

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGOLAHAN RUMAH DATA
KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB LONG MELAHAM KECAMATAN
LONG BAGUN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**



Oleh :

**YURITA
NPM : 1913201124**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis implementasi pengolahan rumah data
kependudukan di kampung KB Long Melaham
Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2025

Nama : **YURITA**

NPM : 1913201124

Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat

Perminatan : Administrasi & Kebijakan Kesehatan (AKK)

Fakultas : Kesehatan Masyarakat

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 24 Februari 2025
dan dinyatakan Lulus serta berhak menyandang gelar Sarjana Kesehatan
Masyarakat (SKM)

Menyetujui

Dewan Penguji :

Ketua Penguji/Pembimbing I
Herry Farjam, SKM, M.Kes
NIDN. 1102 088 602

(.....)

Anggota Penguji/Pembimbing II
Herlina Magdalena, SKM, M.Kes
NIDN. 1123 047 203

(.....)

Anggota Penguji/Penguji I
Nordianiwati, SKM, Kes
NIDN. 1126 038 602

(.....)

Anggota Penguji/Penguji II
Sri Evi Nweyarsi Pengadongan, S.Si., M.Kes
NIDN. 1101 018 304

(.....)

Anggota Penguji/Penguji III
Godefridus Bali Groda, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1128 108 802

(.....)

Mengetahui Dekan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya
Gama Mahakam Samarinda


Ilham Rahmatullah, SKM., M.Ling.
NIK. 2012.089.140

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurita

NPM : 1913201124

Judul Skripsi : Analisis implementasi pengolahan rumah data
kependudukan di kampung KB Long Melaham Kecamatan
Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian Laporan Skripsi berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programing yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti akan mencantumkan sumber secara jelas.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan

norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Samarinda,
mbuat pernyataan,

Yurita
NPM: 1913201124

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurita
NPM : 1913201124
Fakultas/ Jurusan : Kesehatan Masyarakat/ Kesehatan Masyarakat
Jenis : Skripsi
Judul : Analisis implementasi pengolahan rumah data
kependudukan di kampung KB Long Melaham
Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2025

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk

1. Memberi hak bebas royalti kepada perpustakaan UWGM Samarinda atas penelitian karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan.
3. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UWGM Samarinda, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/ pencipta.
4. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UWGM Samarinda, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda,
Yang Menyatakan



Yurita

ABSTRAK

Yurita. Analisis implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025, di bawah bimbingan Bapak Herry Farjam, SKM., M.Kes, dan Ibu Herlina Magdalena, SKM., M.Kes.

Keberadaan Rumah Data Kependudukan yang ada di kampung KB Long Melaham, belum bekerja dengan baik. Berdasarkan studi pendahuluan terdapat tidak ada dana yang didapat oleh Rumah Data Kependudukan dan juga keterbatasan sumber daya manusia yang minimnya pengetahuan untuk melayani masih kurang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dana dan pengetahuan petugas dalam implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.

Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Waktu penelitian di laksanakan bulan Juni 2024. Informan terdiri dari informan utama Penyuluh Keluarga Berencana kampung, informan kunci Ketua Rumah Data, dan informan pendukung Kader Rumah Data Kependudukan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Anggaran dana: Dana yang ada dalam Rumah Data Kependudukan ada yang berasal dari Bantuan Operasional Kampung KB (BOKB) dan bantuan sosial dari kader yang bekerja di Rumah Data Kependudukan, 2). Pengetahuan: Pengetahuan yang dimiliki petugas/pengurus Rumah Data Kependudukan cukup baik seperti mendata keluarga, pengolahan data serta laporan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan dengan petinggi kampung.

Untuk menunjang keberhasilan program implementasi pengolahan rumah data kependudukan, perlu adanya komunikasi dan koordinasi Rumah Data Kependudukan dengan Petinggi yang terkait mengenai anggaran dana yang

diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Desa yang dikoordinasikan, serta kualitas sumber daya dalam melakukan pendataan keluarga.

Kata Kunci: Implementasi Program, Rumah Data Kependudukan.

Kepustakaan : 35 (1990 s.d 2023)

ABSTRACT

Yurita. Analysis of the implementation of home processing of population data in KB Long Melaham village, under the guidance of Mr. Herry Farjam, SKM., M.Kes, and Mrs. Herlina Magdalena, SKM., M.Kes.

The existence of the Population Data House in the Long Melaham KB village has not been working properly. Based on preliminary studies, there were no funds received by the Population Data House and also limited human resources with minimal knowledge to provide services. The purpose of this study was to determine the funds and knowledge of officers in implementing population data processing in the Long Melaham KB village.

This research is qualitative with a descriptive approach. The research was conducted in June 2024. The informants consisted of the main informants of the Village Family Planning Counselor, the key informants of the Head of the Data House, and the supporting informants of the Population Data House Cadres who were determined using purposive sampling techniques. The research instrument used interview and observation guidelines.

The results of this research show that: 1). Fund budget: Some of the funds in the Population Data House come from Operational Assistance for Family Planning Villages (BOKB) and social assistance from cadres who work at the Population Data House, 2). Knowledge: The knowledge possessed by officers/managers of the Population Data House is quite good, such as registering families, processing data and reporting activities that can be accounted for by village officials.

To support the success of the population data house processing implementation program, there needs to be communication and coordination between the Population Data House and the relevant officials regarding the budget which is expected to contribute to the coordinated Village, as well as the quality of resources in carrying out family data collection.

Keywords: Program Implementation, Population Data House.

Bibliography: 35 (1990 to 2023)

RIWAYAT HIDUP



Yurita. Lahir pada tanggal 18 Mei 1992 di Long Nawang, lahir pada pasangan bapak Jarin Kirung dan Ibu Ludung Impung dan merupakan anak kedua dari enam bersaudara yakni Piter, Harun, Depritas Imanuel, Varida Iping dan Juliana Magdalena. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negri 002 Long Merah dan lulus pada tahun 2004, Kemudian melanjutkan Pendidikan ke sekolah Menengah Pertama Negri 23 Sendawar Kab. Kutai Barat lulus pada tahun 2008. Setelah lulus, pendidikan dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negri 8 Sendawar kab. Kutai Barat lulus pada tahun 2011.

Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Falkultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK). Pada tahun 2022 penulis melakukan PBL II di kampung Ujoh Bilang RT 06 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, Penulis juga melanjutkan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham kecamatan long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka sangatlah sulit untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

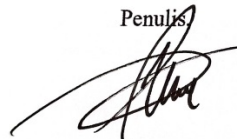
1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Ilham Rahmatullah, SKM., M.Ling selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Ibu Apriyani, SKM., MPH selaku Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak Istiarto, SKM., M.Kes, selaku Ketua Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. Bapak Herry Farjam, SKM., M.Kes, selaku dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Ibu Herlina Magdalena, SKM., M.Kes, selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan dan selalu memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan pengajaran dan pendidikan selama dalam perkuliahan.
8. Ketua Rumah Data Kampung KB Long Melaham Kabupaten Mahakam ulu yang memberikan izin penelitian dan staf yang membantu pelaksanaan penelitian.
9. Orangtua tersayang dan tercinta yang telah memberikan doa, nasehat dan dukungannya baik secara moral maupun spiritual yang tidak pernah putus-putusnya kepada saya.
10. Kepada suami dan anak-anakku tercinta, terima kasih atas segala dukungan dan pengertiannya selama mamah (penulis) kuliah hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
12. Kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu memberi pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam Skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka dengan terbuka penulis menerima masukan kritik dan saran perbaikan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu kesehatan dan semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang dilakukan.

Samarinda, Februari 2025

Penulis,


Yurita


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	8
1. Implementasi	8
2. Kebijakan Publik	11
3. Implementasi Kebijakan Publik	14
4. Manajemen Sumber Daya Manusia	21
5. Rumah Data Kependudukan.....	25
6. Tinjauan Variabel yang ingin Diteliti.....	28
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pikir	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37

C. Subjek Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Jadwal Penelitian.....	43
I. Operasional	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Kampung	46
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.....	47
3. Kondisi Keadaan	48
B. Hasil Penelitian	49
1. Deskripsi Hasil Penelitian	49
2. Karakteristik Informan	50
C. Pembahasan.....	60
1. Anggaran Dana.....	60
2. Pengetahuan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut Dunn dalam Ayuningtyas (2014).....	17
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data (satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A, B, C)	42
Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data Metode Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, 2019).....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	44
Tabel 3.2 Tabel Operasionalisasi.....	44
Tabel 4.1 Data Pemimpin di Kampung Long Melaham.....	46
Tabel 4.2 Data Orbitasi Kampung Melaham.....	49
Tabel 4.3 Data Informan Penelitian.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	73
Lampiran 2: Master Penelitian.....	77
Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian.....	91
Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah DataKu berkedudukan sebagai kelompok kegiatan yang berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya ia merupakan bagian dari sistem pembangunan kependudukan, yang produknya dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* (pemerintah, masyarakat sipil atau swasta) untuk meningkatkan akurasi intervensi program pembangunan masyarakat. Rumah data kini secara fungsi akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data kependudukan dan keluarga serta pembangunan di tingkat desa/kelurahan.

Salah satu data yang ada di Rumah Data Kependudukan Kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu adalah kunjungan Posyandu yang ada di Posyandu Batu Teneveng. Data tahun 2024 ini kunjungan di bulan Januari ada sebanyak 37 orang, bulan Februari 42 orang, bulan Maret 16 orang, bulan April 22 orang, bulan Mei 37 orang, bulan Juni 25 orang, bulan Juli 29 orang, bulan Agustus 48 orang, bulan September 39 orang, bulan Oktober 30 orang, bulan November 40 orang, dan bulan Desember 35 orang. Rata-rata kunjungan Posyandu Batu Teneveng dalam satu bulan berjumlah 33 orang

Selain data tentang kegiatan kunjungan posyandu, Rumah Dataku juga mempunyai informasi mengenai Kesehatan Masyarakat seperti Pengendalian dan Pemberantasan penyakit Malaria, pada tahun 2023, Kasus DBD terjadi di 6 Puskesmas, kasus tertinggi di Puskesmas Ujoh Bilang terdapat 117 kasus, dan kasus terendah di Puskesmas Laham terdapat 4 kasus, Puskesmas Long Hubung 22 kasus, Puskesmas Long Pahangai 11 kasus, Puskesmas Tiong Ohang 11 kasus dan Puskesmas Mamahak Besar 40 tidak terdapat kasus. Dan kasus meninggal terdapat di Puskesmas Ujoh Bilang sebanyak 2 kasus.

Prasyarat penting bagi pendirian Kampung KB adalah ketersediaan data dan indikator pembangunan yang terkini, valid dan dapat dipercaya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan mengembangkan model yang dikenal dengan Rumah Data Kependudukan (Kustanto, Fitriyatus, & Utami, 2020).

Rumah Data Kependudukan memang dalam konsep dasarnya difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro, mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, dan memanfaatkan data kependudukan yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di Kampung KB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan upaya pemanfaatan Rumah Data Kependudukan, sebagai sebuah program yang diharapkan mampu menjadi basis data dan informasi bagi intervensi pembangunan di kampung KB, sebagian besar pengelola data masih kurang mendapat dukungan anggaran yang memadai. Satu kendala yang dihadapi oleh pelaksana lapangan Kampung KB dalam melaksanakan kegiatan adalah keterbatasan dana. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat maksimal.

Anggaran menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan Rumah Data Kependudukan sebagai bagian penting dari program Kampung KB. Hal ini senada dengan pendapat (Rianto et al., 2019). Minimnya dukungan anggaran menjadi salah satu tantangan yang dihadapi program Kampung KB. Dampaknya adalah masyarakat enggan menjadi kader karena minimnya insentif atau stimulan finansial yang tersedia. Penelitian ini sejalan dengan (Kustanto, Fitriyatus, & Utami, 2020), Tantangan pengembangan rumah data kependudukan di Kabupaten Sidoarjo Challenges in Developing Population Data House in Sidoarjo Regency. Tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan Rumah Data di Kabupaten Sidoarjo antara lain: keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya (sumber daya manusia

dan sarana prasarana pendukung), belum optimalnya koordinasi, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Menurut World Population data sheet 2013 Indonesia merupakan Negara ke 5 di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 249 juta. Diantara Negara ASEAN, Indonesia merupakan penduduk terbanyak dari 9 Negara anggota lain dengan angka fertilitas atau total fertility rate (TFR) 2,6. Indonesia masih berada diatas rata – rata TFR negara Asean yaitu 2,4, sedangkan menurut Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan bahwa penduduk Indonesia pada Tahun 2020 akan mencapai 271,1 juta jiwa. (BPS, 2021).

Laju pertumbuhan penduduk dunia semakin meningkat. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) memprediksikan tahun 2016 jumlah penduduk dunia mencapai 7,3 miliar, tahun 2030 diperkirakan mencapai 8,5 miliar dan tahun 2050 jumlah tersebut diperkirakan mencapai 10,6 miliar. Hal ini menjadi problematika dunia yang dapat mengancam pemenuhan kebutuhan hidup manusia dengan layak. (Putri & Oktora, 2020).

Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam penanganan masalah kependudukan salah satunya dengan penancangan Program Keluarga Berencana (KB). Namun program tersebut dirasa lambat laun melemah dari berbagai sudut persoalan, mulai dari pencapaian peserta KB yang mengalami penurunan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program tersebut.

Rumah dataku adalah kelompok kegiatan masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data kependudukan dan keluarga serta pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Oleh karena itu keberadaan Rumah DataKu penting untuk didirikan di seluruh desa untuk dapat memasok kebutuhan data yang akan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda menyelenggarakan kegiatan Penguatan Manajemen Pengelola Rumah Data Kependudukan (RDK) Non Pro PN Kota Samarinda yang diikuti oleh Ketua/

Kader RDK Non Pro PN se kota Samarinda dan PKB/PLKB per kecamatan yang mewakili. (DPPKB, 2023).

Kampung KB merupakan suatu wadah untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta program pembangunan lainnya dilini lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB, dan Surat Kepala BKKBN Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016 Perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia. (Fachrisa et al., 2020).

Rumah Data Kependudukan pada dasarnya dibentuk untuk meningkatkan tata kelola data, terutama di desa atau kampung. Keberadaan data di Rumah Data Kependudukan terintegrasi dengan sumber data lain, seperti data sektoral yang dikumpulkan oleh berbagai institusi, misalnya data luas lahan pertanian, perkebunan, data kepemilikan jamban keluarga, data balita kurang gizi atau teridentifikasi *stunting*, data penduduk menurut tingkat pendidikan, pekerjaan dan lainnya, yang kesemuanya dapat dimanfaatkan untuk intervensi pembangunan. Kualitas data diharapkan akan semakin baik, karena data tersebut dikumpulkan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rumah Data Kependudukan sangat penting didirikan di Kampung-kampung KB yang telah dibentuk di setiap Kabupaten, Kota, dan Kecamatan. Hal ini sesuai dengan program KKBPK serta upaya terkait lain berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam mengupayakan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, kualitas penduduk yang memadai serta persebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta perkembangan sosial budaya.

Kampung KB Long Melaham ini dicanangkan oleh Bapak Presiden RI (Ir. Joko Widodo) pada tanggal 19 September 2017, yang targetnya pada tahun 2018 terdapat satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di seluruh Indonesia. Kampung KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil. Kampung KB akan menjadi ikon program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Namun sayangnya aspek keberadaan Rumah Data Kependudukan yang ada di kampung KB Long Melaham yang merupakan variabel penting di Kampung KB, belum bekerja dengan baik. Hal ini menjadi masalah dalam pengembangan Kampung KB untuk menjadi Kampung KB yang paripurna ke depannya. Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya berupa sarana prasarana pendukung. Keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya dari aspek kuantitas tetapi juga kualitas. Ketersediaan data statistik valid dan terbaru yang disediakan melalui Rumah DataKu diharapkan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam melakukan perencanaan untuk membangun Kampung KB. Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan, dan mengevaluasi sasaran program, sehingga tujuan pembangunan Kampung KB, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat tercapai.

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari pengolahan data kependudukan. Keterbatasan pengetahuan kader menjadi salah satu kendala dalam implementasi program Kampung KB. (Rahman & Indrawadi, 2019).

Tujuan Rumah Data Kependudukan ini tidak lain untuk membangun kepedulian dan kesadaran. Oleh sebab itu, Kampung KB dalam mempunyai Rumah Data Kependudukan bukan semata hanya sebagai syarat menjadi Kampung KB percontohan namun menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap

Kampung KB guna menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan studi pendahuluan terdapat tidak ada dana yang didapat oleh Rumah Data Kependudukan dan juga keterbatasan sumber daya manusia yang minimnya pengetahuan untuk melayani di Rumah Data Kependudukan serta keahlian yang dimiliki petugas masih kurang dalam memberikan informasi mengenai data tentang pengembangan tujuan dari program keluarga berencana (KB) melalui Rumah Data Kependudukan.

Maka berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, di sini peneliti akan mencoba untuk mengkaji lebih dalam dan mengemukakan berbagai persoalan di kampung KB Long Melaham Kabupaten Mahakam Ulu dengan melakukan penelitian tentang “Analisis implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu “Bagaimana implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui anggaran dana dalam implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan petugas dalam implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut :

1. Bagi Rumah Data Kependudukan Kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu : Hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian sehingga petugas bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam pengolahan Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
2. Bagi FKM: Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai kesehatan serta kemampuan dalam melakukan penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bagi Umum: Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi atau bahan masukan tambahan bagi Pemerintah khususnya kampung KB Long Melaham dalam implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bagi Peneliti selanjutnya:
 Penelitian ini merupakan kesempatan baik dalam menerapkan teori, dan untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian, serta sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut (Hardiyatno, 2023), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut (Aryanta et al., 2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan

Menurut (Zakki, 2018). Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut (Aryanta et al., 2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Selanjutnya menurut (Taufik, 2013), “Sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Sedangkan Horn (Nofriandi, 2017), “Mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (Maldun, 2015), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Selanjutnya Kaporu (2014) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- 1) Kondisi lingkungan (*environmental conditions*)
- 2) Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- 3) Sumberdaya (*resources*).
- 4) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Dan menurut (Haryati et al., 2021), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

- 1) Kualitas kebijakan itu sendiri.
- 2) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- 3) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- 4) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- 5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
- 6) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

b. Tahapan-Tahapan Implementasi

Tahapan implementasi dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahapan Perencanaan. Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah salah satu fungsi aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan alat atau sarana prasarana guna menunjang keberlangsungan suatu program (Sanjaya, 2015). Jadi perencanaan merupakan suatu proses yang menentukan hal-hal

yang akan dicapai dari tujuan yang diinginkan sesuai dengan tata cara yang telah direncanakan sebelumnya.

- 2) Tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan detail, penerapannya biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap siap untuk dilaksanakan. Pelaksanaan juga diartikan sebagai penerapan. Jadi pelaksanaan adalah tindakan dari suatu rencana yang sudah disusun secara terperinci untuk diterapkan dan siap untuk dilakukan secara matang.
- 3) Tahapan evaluasi. Evaluasi disebut sebagai suatu tindakan untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dalam artian lain, evaluasi berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses menentukan nilai atau hasil untuk sesuatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan atau pedoman tertentu untuk menentukan hasil yang optimal dari tujuan yang ingin dicapai.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Pengertian kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan akademisi di bawah ini.

Menurut Budiningsih (2017), dalam arti yang luas policy mempunyai dua aspek pokok antara lain:

- 1) Policy merupakan praktika sosial, ia bukan event yang tinggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktika kehidupan masyarakat, dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.
- 2) Policy adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan claim dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan incentive bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dari dua aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa *policy* di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.

Sedangkan menurut Laswell (2014), “sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (*a projected program of goals, values, and praktives*)”. Selanjutnya menurut Manna & Syafie (2014), kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Dalam (Subarsono, 2012) menyatakan, “kebijakan publik pada hakekatnya berurusan dengan bagaimana memutuskan “*who gets what and who pays given relative resource scarcity*”.

Dan menurut Nugroho (2011), secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan formal.
- 2) Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi).
- 3) Pernyataan pejabat publik dalam forum publik.
- 4) Perilaku pejabat publik.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas tersebut dapat digarisbawahi bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.

b. Proses Kebijakan Publik

Sebuah proses analisis kebijakan publik merupakan proses kegiatan yang bersifat politis dengan cara merangkai aktivitas intelektual. Analisis kebijakan publik itu sendiri sangat berguna dalam mengimplementasikan atau merumuskan sebuah kebijakan publik. Untuk mengembangkan kebijakan publik yang baik pada masa yang akan datang, teori-teori dalam analisis kebijakan publik lah yang akan digunakan. Menurut Dunn (2015), dalam kutipan (Hayat dan Pendapatan, 2018) menjelaskan bahwa aktivitas menciptakan pengetahuan tentang bagaimana proses pembuatan kebijakan merupakan inti dari sebuah analisis kebijakan.

Proses dalam menciptakan sebuah pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut adalah menilai kebijakan dan sebab akibat. Di dalam sebuah kebijakan publik, proses ini tidak boleh diabaikan agar kebijakan tidak berhenti di tengah jalan atau hanya menjadi pembahasan belaka, apalagi dengan menimbulkan persoalan baru dari kebijakan yang dilakukan. Agar sebuah proses kebijakan publik tidak berdampak buruk pada masyarakat. Proses pengambilan kebijakan merupakan hal yang sangat penting, (Parsons, 2001) mengatakan kajian terhadap kebijakan publik dalam mengintegrasikan dan mengkontekstkan model dan riset dari

sebuah disiplin yang mengandung orientasi problem dan kebijakan merupakan tujuan utama. Menurut Hayat dan Pendapatan (2018), Kebijakan publik memiliki urutan prosesnya dalam memberikan landasan penting dalam proses sebuah kebijakan yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan hal yang baik, dengan arti kebaikan dalam kebijakan publik tertuang dalam filosofi dan orientasi yang dibangun dalam mewujudkan kepentingan masyarakat.
- 2) Mempunyai nilai dan norma yang terkandung didalamnya, yang bisa dikatakan setelah kebijakan publik telah diterima oleh masyarakat maka apakah nilai dan norma sudah sesuai dengan yang ada atau tidak, sebuah kebijakan tersebut melanggar nilai substansi dan kode etik atau tidak.
- 3) Kebijakan-kebijakannya harus berdasarkan pertimbangan politik, yang artinya setelah melihat nilai aspek dan norma dalam suatu kebijakan maka setelahnya yaitu masuk kedalam ruang institusi politik, berbagai kemungkinan dan pertimbangan menjadi pilihan terbaik dalam proses politik yang ada di dalamnya.
- 4) Kebijakan publik harus melewati proses politik, kebijakan yang sudah masuk ke dalam institusionalisasi politik akan menghasilkan sebuah keputusan bersama.
- 5) Sebuah kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan merupakan kinerja atau kegagalan kebijakan

3. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik. Menurut R. Nugroho (2014), “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya”. Menurut Huntington (2015) , perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu.

Selanjutnya menurut Hamdi & Leite (2014), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”. Aryanta et al. (2015) menyatakan, “Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”. Kemudian menurut Menurut Matland (Hamdi & Leite, 2014) “implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*topdown*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*)”.

Matland (Hamdi & Leite, 2014) mengemukakan, adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

- 1) Konflik rendah-ambigiutas rendah (implementasi administratif).
- 2) Konflik tinggi-ambigiutas rendah (implementasi politis).
- 3) Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik).
- 4) Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental).

Kemudian menurut Edward III), “tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat”.

b. Model Implementasi Kebijakan

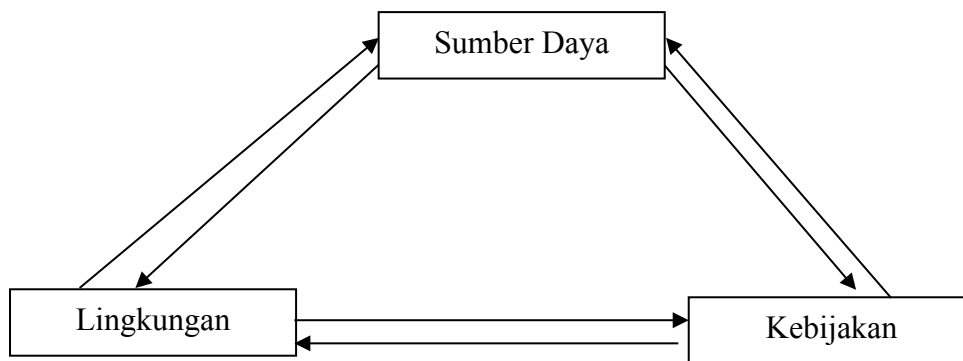
Para ahli kebijakan berpendapat bahwa terkait dengan implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi suatu kebijakan ada faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi, sehingga dimungkinkan tujuan kebijakan menjadi mudah atau sulit dicapai. Banyak teori implementasi kebijakan yang dapat dijadikan model, namun dalam tulisan ini hanya membahas lima teori.

1) Teori George C Edwards III

George C Edwards III, menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu:

- a) Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- b) Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi atau Sikap-Sikap. Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d) Struktur Birokrasi. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standart Operating Procedure = SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



Gambar 2.1 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut Dunn dalam (Ayuningtyas et al., 2018)

Mengamati model implementasi George C Edwards III, tentang kontens dan konteks kebijakan, bahwa isi/kontens kebijakan harus disesuaikan dengan konteksnya yakni siapa SDM yang dituju, bagaimana persepsi dan tanggapan yang diberikan dan bagaimana sikap dan tanggapan yang diberikan birokratnya dalam mencapai kesepakatan dalam implementasi kebijakan yang ada sehingga akan mencapai hasil yang maksimal. Tujuan yang hendak dicapai merupakan target akhir dari implementasi, dan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Model implementasi kebijakan tersebut menggambarkan, bahwa proses implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif bila dipengaruhi oleh beberapa variabel.

- 2) Teori Thomas & Grindle (1990) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal:
 - a) Dilihat dari Prosesnya. Dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang dirancang dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b) Apakah Tujuan Kebijakan Tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - (1) Impact atau dampaknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - (2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) yang terkait dengan formulasi kebijakan.
- 3) Teori Mazmanian dan Sabatier Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu:
 - a) Karakteristik masalah, meliputi:
 - (1) Ketersediaan teknologi dan teori kausal
 - (2) Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - (3) Sifat populasi
 - (4) Derajat perubahan perilaku yang diharapkan.
 - b) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, meliputi:
 - (1) Kejelasan/konsistensi tujuan atau sasaran;
 - (2) Teori kausal yang memadai;
 - (3) Sumber keuangan yang mencukupi;
 - (4) Integrasi organisasi pelaksana;
 - (5) Diskresi pelaksana;

- (6) Rekrutmen dari pejabat pelaksana;
- (7) Akses formal pelaksana ke organisasi lain.
- c) Faktor-faktor diluar (non) peraturan, meliputi:
 - (1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi;
 - (2) Perhatian terhadap masalah kebijakan;
 - (3) Dukungan publik;
 - (4) Sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama;
 - (5) Dukungan kewenangan;
 - (6) Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana. Model ini terkesan sangat menganggap suatu implementasi kebijakan akan efektif jika birokrasi pelaksanaannya mematuhi yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis). Model ini disebut model top-down.
- 4) Teori T.B. Smith T.B. Smith bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel:
 - a) *Idealized policy*, yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target groups untuk melaksanakannya;
 - b) *Target groups*, yaitu bagian dari *policy stakeholder's* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Dikarenakan kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan;
 - c) *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung-jawab dalam implementasi kebijakan
 - d) *Inveronmental factors*, yaitu unsur-unsur didalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
- 5) Teori Van Meter dan Van Horn Van Meter dan Van Horn merumuskan model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Standar dan Sasaran Kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas, sehingga dapat direalisasikan. Bila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- b) Sumber Daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia.
- c) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d) Karakteristik Badan Pelaksana. Karakteristik badan pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, vitalitas suatu organisasi, kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.
- e) Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f) Disposisi Implementor. Mencakup tiga hal penting, yaitu:
 - (1) Respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan

- (2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- (3) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor. Teori ini secara eksplisit oleh Van Meter dan Van Horn memasukkan variabel kondisi sosial ekonomi dan politik sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kinerja kebijakan

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Pengertian manajemen sumber daya manusia

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencanaan, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggih. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran karyawan tidak diikutsertakan. Manajemen sumber daya manusia menjadi bagian dari manajemen yang fokus pada peranan pengaturan manusia dalam mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan.

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang menekankan pada unsur sumber daya manusia dan sudah menjadi tugas manajemen sumber daya manusia untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang tepat sesuai pekerjaannya, sehingga mampu bekerja optimal demi tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai aktivitas untuk mengerakkan dan menserasikan sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam rangka melakukan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Teguh & Rosidah, 2004).

Dalam suatu organisasi hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama tercapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian jasa, pemeliharaan dan

pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. ((Mangkunegara & Prabu, 2019). Sedangkan menurut The Liang Gie yang dikutip dalam Elbadiansyah “Manajemen adalah segenap penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu (Elbadiansyah, 2019).

Sumber daya manusia menempati posisi strategis dalam suatu organisasi, maka dari itu sumber daya manusia harus digerakkan secara efektif dan efisien sehingga mempunyai tingkat hasil daya guna yang tinggi. Manajemen sumber daya manusia adalah rangkaian strategis, proses dan aktivitas yang di desain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu sumber daya manusia.

Manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, dalam pergerakan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi.

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang di dalamnya terkandung fungsi-fungsi manajerial dan operasional yang ditujukan agar sumber daya manusia dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dengan perencanaan sumber daya manusia dapat menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan rencana

organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis.

b. Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Perusahaan atau organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentunya menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Guna mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia yang telah dikemukakan, maka sumber daya manusia harus dikembangkan dan dipelihara agar semua fungsi organisasi dapat berjalan seimbang.

Menurut Ismail Solihin fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari:

- 1) *P*
lanning (Perencanaan) Yaitu suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan (strategi) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan mencakup:
 - a) Menetapkan tujuan
 - b) Mengembangkan berbagai premis mengenai lingkungan perusahaan dimana tujuan-tujuan perusahaan hendak dicapai.
 - c) Memilih arah tindakan agar mencapai tujuan-tujuan tersebut.
 - d) Merumuskan berbagai aktifitas.
 - e) Melakukan perencanaan ulang untuk mengoreksi berbagai kekurangan dalam perencanaan terdahulu.
- 2) *Organizing* (Pengorganisasian) Yaitu suatu proses dimana karyawan dan pekerjaannya saling dihubungkan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- 3) *Staffing* (Pemilihan Staf) Yaitu proses untuk memastikan bahwa karyawan yang kompeten dapat dipilih, dikembangkan dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan perusahaan.

4) *Leading* (Memimpin) Memimpin adalah suatu proses memotivasi individu atau kelompok dalam suatu aktifitas hubungan kerja (*task related activities*) agar mereka dapat bekerja dengan sukarela dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan.

5) *Controlling* (Pengendalian) Merupakan proses untuk memastikan adanya kinerja yang efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen manajemen sumber daya manusia yang paling sentral dan merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen.

c. Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen. Berikut peranan manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan yaitu:

- 1) Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement, dan job evaluation.
- 2) Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas *the right man in the right place and the right man in the right job*.
- 3) Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian.
- 4) Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.
- 5) Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
- 6) Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.
- 7) Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.

- 8) Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan.
- 9) Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.
- 10) Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. (Hasibuan, 2020).

Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat.

5. Rumah Data Kependudukan

a. Pengertian Rumah Dataku

Rumah DataKu adalah kelompok kegiatan (Poktan) masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data kependudukan dan keluarga serta pembangunan di tingkat desa/kelurahan.

b. Bentuk dan Kedudukan

Rumah DataKu berbentuk kelompok kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat fungsional dalam rangka penyediaan data kependudukan yang valid dan terbaru, melalui skema dari, oleh, dan untuk masyarakat. Rumah DataKu berkedudukan sebagai kelompok kegiatan yang berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya ia merupakan bagian dari sistem pembangunan kependudukan, yang produknya dapat dimanfaatkan oleh stakeholder (pemerintah, masyarakat sipil atau swasta) untuk meningkatkan akurasi intervensi program pembangunan masyarakat.

c. Tujuan dan Fungsi

Tujuan dari pendirian Rumah DataKu adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan dan keluarga bagi masyarakat.
- 2) Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam

mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Menyediakan data dan analisis kependudukan serta informasi keluarga bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna. Sejalan

Sejalan dengan tujuan di atas, Rumah DataKu memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Pusat data kependudukan dan informasi keluarga di level desa/kelurahan Rumah DataKu menyediakan data kependudukan dan informasi keluarga dari berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder.
- 2) Penyedia data basis bagi intervensi pembangunan kependudukan Rumah DataKu menyediakan data dan analisis yang terpercaya bagi pemerintah, masyarakat sipil dan swasta sebagai dasar untuk melakukan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Instrumen pendidikan kependudukan dan keluarga bagi masyarakat Keberadaan Rumah DataKu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aspek kependudukan dan keluarga dalam pembangunan.

d. Kegiatan pokok pengolahan Rumah Data Kependudukan

Kegiatan pokok Rumah Dataku meliputi 5 hal: pengumpulan dan *updating* data, pengolahan data, analisis data, dan penyajian data serta memberikan masukan atas temuan yang dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti.

- 1) Pengumpulan dan *updating* data

Rumah DataKu melakukan pengumpulan dan *updating* berbagai jenis data sesuai dengan panduan pengelolaan data tingkat desa/kelurahan.

- 2) Pengolahan data

Rumah DataKu melakukan pengorganisasian data hasil pengumpulan dan *updating* sesuai dengan klasifikasi data.

3) Analisis Data

Rumah DataKu melakukan analisis yang berkaitan dengan kebutuhan, persoalan, maupun potensi daerah berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

4) Penyajian Data

Rumah DataKu melakukan penyajian data yang dianggap penting untuk disajikan dalam berbagai bentuk media.

5) Memberikan masukan atas temuan yang dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti. Melakukan advokasi terhadap pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pembangunan berbasis data kelompok sasaran yang jelas dan akurat.

e. Hubungan Pembentukan Rumah Data Kependudukan dalam Kampung KB

Rumah Data Kependudukan (RDK) adalah pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas (KB). RDK merupakan salah satu prasyarat wajib dalam pembentukan Kampung KB. Rumah DataKu pada dasarnya dibentuk untuk meningkatkan tata kelola data, terutama di desa atau kelurahan. Keberadaan data di Rumah DataKu terintegrasi dengan sumber data lain, seperti data sektoral yang dikumpulkan oleh berbagai institusi, yang kesemuanya itu dapat dimanfaatkan untuk perencanaan atau intervensi program pembangunan di desa/kelurahan.

Kualitas data diharapkan akan semakin baik, karena data tersebut dikumpulkan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya data yang berkualitas di Rumah DataKu dapat memberikan arah yang lebih seksama menuju sasaran pembangunan dan menjadi dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan pembangunan di desa atau kelurahan. Untuk itu maka Rumah DataKu sangat penting

untuk dibentuk, sebagai basis data dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa atau kelurahan.

Adapun hubungan Kampung KB dengan RDK sebagai berikut:

- 1) RDK merupakan wadah untuk mengumpulkan dan mengelola data kependudukan di Kampung KB.
- 2) Data yang dikumpulkan di RDK digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan di Kampung KB.
- 3) RDK membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi pembangunan di Kampung KB.
- 4) RDK dapat dijadikan sebagai wahana belajar dan interaksi masyarakat.

6. Tinjauan Variabel yang Ingin Diteliti

Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program (sasaran) dan apakah tujuan program tercapai.

Berdasarkan dari tujuan khusus penelitian yang diteliti yaitu: Untuk mengetahui bagaimana anggaran dana dan pengetahuan petugas dalam implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham, maka akan diuraikan penjelasan dari masing-masing variabel yang diteliti:

a. Anggaran Dana

Anggaran memiliki peranan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.

Karena anggaran memiliki kedudukan penting, suatu unit pemerintah harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

Menurut Mardiasmo, Barnes, & Sakurai (2008) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Pada prinsipnya anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang mencerminkan semua unsur kegiatan operasional dalam suatu perusahaan atau lembaga secara terperinci. Oleh karena itu diperlukan koordinasi serta pengawasan agar pelaksanaan dari rencana tersebut tidak menyimpang dari yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Pengetahuan

Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan organisasi di berbagai level, baik level pimpinan atau top manajer, middle manajer maupun staf atau karyawan termasuk di dalamnya investor atau pemodal. Sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi adalah orang yang memberikan kerja, bakat, kreativitas, dan semangat kepada organisasi. Oleh karena itu kesulitan sumberdaya manusia merupakan sumber masalah dalam organisasi. Konsekuensi dari hal ini adalah tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas sebagai perencana dan pelaksana program kegiatan. Kapasitas ini ditentukan oleh kapabilitas, kompetensi dan produktivitas kerja.

Pengetahuan (*knowledge*) adalah kemampuan individu untuk mengingat kembali (*recall*) atau mengenali kembali nama, kata, inspirasi, rumus, dan sebagainya (Widyawati, 2020).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil bahan pembelajaran dan masukan sebagai bahan pembanding dalam menyelesaikan penulisan ini dari berbagai hasil karya tulis dari mahasiswa-mahasiswa yang telah menyelesaikan proposal, yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun	Metode	Variabel	Hasil
1	Pendampingan Pembenahan dan Pengelolaan Rumah Dataku dan Informasi Keluarga Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kelurahan Kauman Kidul Salatiga Yeremia Sabatani Ari Wendy Wijaya T. Gari (2021)	Kualitatif	Kuantitas penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga dan administrasi kependudukan	Berdasarkan hasil praktek lapangan yang dilakukan, pembenahan dan pendampingan ini memberikan manfaat bagi pengurus Rumah Data dan Kampung KB dimana para pengurus mendapatkan pemahaman yang lebih dalam akan inputting data secara digital dengan didukung oleh kelengkapan format data yang ada, tersedianya tempat untuk melakukan verifikasi, analisis dan pengarsipan data serta adanya media promosi kegiatan dan potensi wisata yang ada di Kauman Kidul.

2	Tantangan pengembangan Rumah Dataku di Kabupaten Sidoarjo. Munari Kustanto, Fitriyatus Sholihah, dan Maslihatin Utami (2020)	Pendekatan deskriptif kualitatif,	Keterbatasan sumber daya, kurangnya sarana dan prasarana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 353 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, tercatat hanya 42 Desa/Kelurahan (11,90%) yang telah memiliki kampung KB. Dari jumlah tersebut tidak semuanya memiliki Rumah Dataku, tercatat hanya tiga Kampung KB (7%) yang telah memiliki Rumah Dataku. Dilihat dari aspek ketersediaan, penyajian dan keterbaharuan data yang ada Kampung KB dan Rumah Dataku di Kabupaten Sidoarjo belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan Rumah Dataku di Kabupaten Sidoarjo antara
---	--	-----------------------------------	--	---

				lain: keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya (sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung), belum optimalnya koordinasi, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Beberapa upaya yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain mengadakan kompetisi Kampung KB, menyelenggarakan KKN Tematik, membuat aplikasi untuk Rumah Dataku, meningkatkan peran Pokja Kampung KB, hingga pelatihan untuk pengurus dan penyuluh KB.
3	Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga	Penelitian kualitatif dengan tipe	Partisipasi masyarakat, kampung KB	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi

	Berencana di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Nopiyani (2019)	penelitian deskriptif.		pengambilan keputusan awal belum terlibat, namun dalam keputusan yang sedang berlangsung dan keputusan operasional sudah terlibat dengan baik. Dari pelaksanaan masyarakat sudah berkontribusi sumber daya dan menjadi peserta kegiatan Kampung KB. Dan dari evaluasi langsung masyarakat masih belum dilibatkan, namun dapat terlibat dalam evaluasi tidak langsung dengan memberikan penilaian dan saran terhadap program Kampung KB untuk perbaikan kegiatan yang akan datang
4	Implementasi Program Kampung KB Terhadap Efektivitas Pengguna Akseptor KB Di Dusun Kaluarrang Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Nurinzana (2021)	Penelitian Kualitatif	Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: (1) Komunikasi dalam penerapan program Kampung KB sampai saat ini dapat dikatakan sudah terlaksana

				<p>namun belum berjalan secara efektif (2) Sumber daya yang dimiliki sudah mencukupi baik sumber daya manusia, finansial dan anggaran yang berasal dari APBN (3) Disposisi terkait sikap pelaksana kurang maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran dan komitmen dalam melaksanakan program kampung KB ini (4) Struktur Birokrasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah dilakukan pembentukan pengurus Kampung KB berdasarkan SOP pada saat pencaangan pembentukan di Kampung KB Dusun Kaluarrang Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa</p>
--	--	--	--	--

C. Kerangka Pikir

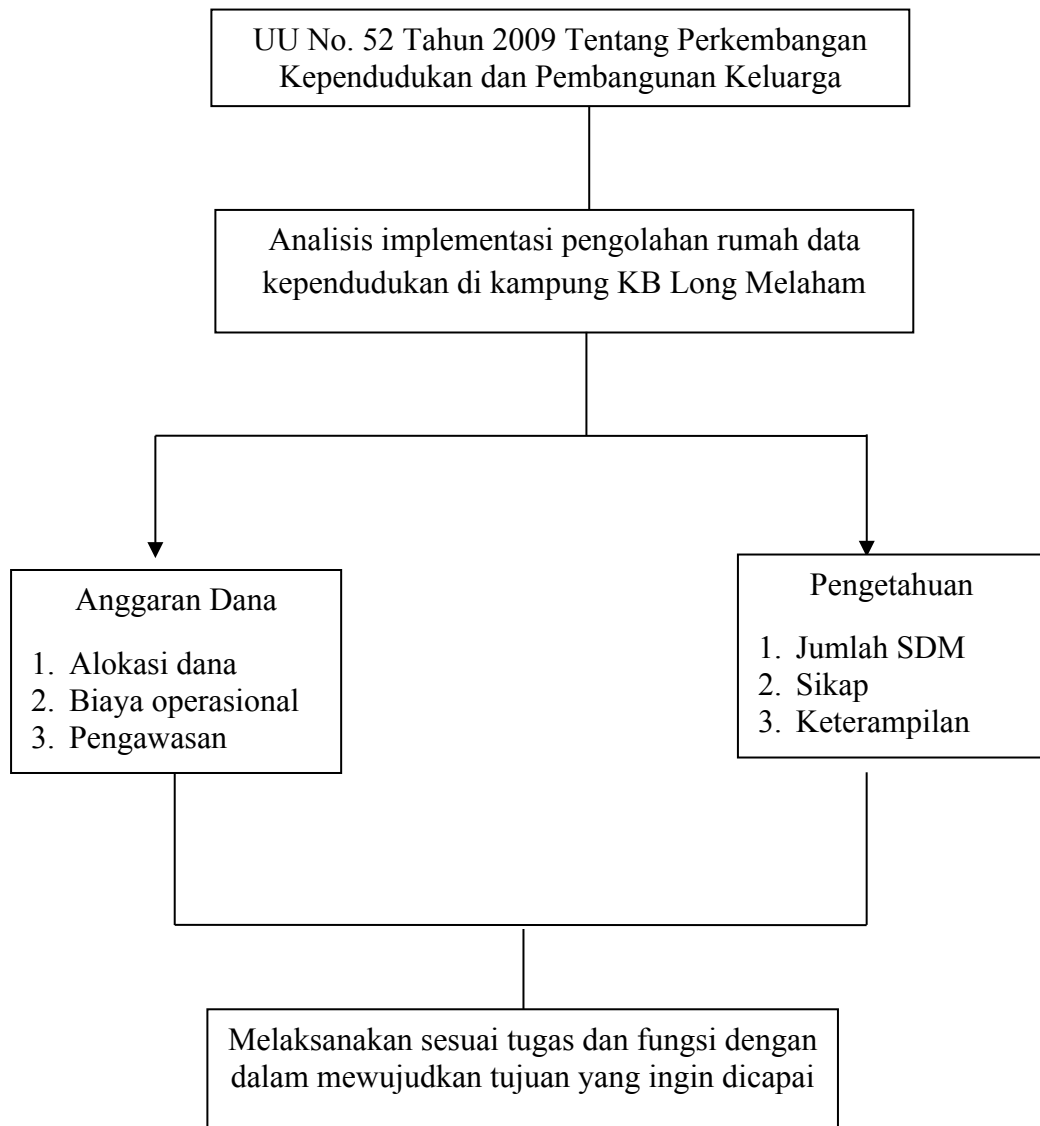
Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Peran serta tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

Kemudian lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kabupaten/kota saat ini memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyusun perencanaan pembangunan dan menentukan apa yang terbaik untuk wilayahnya. Bahkan dengan kebijakan dana desa, maka desa juga diberikan otonomi yang luas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga sebagai kelompok kegiatan masyarakat yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi kependudukan di tingkat mikro menjadi krusial peranannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Salah satu faktor yang dapat mempelancar informasi kesehatan salah satunya adalah anggaran menunjukkan pengeluaran, penerimaan, atau laba yang direncanakan dimasa yang akan datang. Anggaran mencerminkan sasaran, rencana dan program-program organisasi yang akan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Selain itu untuk mewujudkan pelayanan dalam Rumah Data Kependudukan yang berkualitas maka diperlukan petugas yang memiliki pengetahuan yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebab dengan pengetahuan yang dimiliki akan menjadikan pelayanan kesehatan dapat tertangani dengan baik.

Maka kerangka alur pikir yang akan diteliti dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pendapat dari Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2010), berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maksud peneliti menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang Analisis implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di kampung KB di Long Melaham Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam ulu.

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Juni 2024.

C. Subjek Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, informan utama adalah informan yang tahu banyak tentang kondisi permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan tambahan adalah

informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan.

1. Teknik Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini menggunakan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu informan yang memiliki kapasitas dalam menjawab pertanyaan terkait dengan Analisis implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Informan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan adalah

1. Penyuluh Keluarga Berencana kampung KB Batew Teneveng Long Melaham (Informan Kunci).
2. Ketua Rumah Data Kependudukan Kampung KB Batew Teneveng Long Melaham (Informan Utama).
3. Kader Rumah Data Kependudukan Kampung KB Batew Teneveng Long Melaham (Informan Pendukung).

Jadi dalam penelitian ini yang dijadikan informan kunci adalah 1 orang yaitu Penyuluh Keluarga Berencana kampung KB Batew Teneveng Long Melaham, informan utama adalah 1 orang yaitu 1 orang Ketua Rumah Data Kependudukan Kampung KB Batew Teneveng Long Melaham, dan informan pendukung adalah 1 orang yaitu Kader Rumah Data Kampung KB Batew Teneveng Long Melaham.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana sampling mengarah pada generalisasi teoritis. Dalam penelitian kualitatif, sampel bukan mewakili populasi sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Tetapi sampel berfungsi untuk menggali lebih dalam informasi dan data-data penting. Dengan metode ini diharapkan data dapat dicari dan dikumpulkan dari sumber pada orang-orang yang

dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang semakin banyak dan lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.

Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini sangat penting dan dibutuhkan untuk kelancaran penelitian ini, sehingga diperlukan data yang bersifat obyektif dan relevan. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2019). Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan. Peneliti menggunakan data sekunder yaitu artikel tentang data kesehatan, jurnal kesehatan, peraturan menteri kesehatan yang mengatur tentang Analisis implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham.

E. Instrumen Penelitian

Di dalam sebuah penelitian dibutuhkan instrumen untuk mendapatkan data yang valid (Moleong, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data di lapangan, maka peneliti melakukan validasi, terkait

persiapan peneliti untuk terjun ke lapangan. Validasi instrumen penelitian meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif dan penguasaan mengenai obyek penelitian yaitu Analisis implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham.

Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah alat rekam, alat tulis dan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolok ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan kunci dan pendukung dan sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

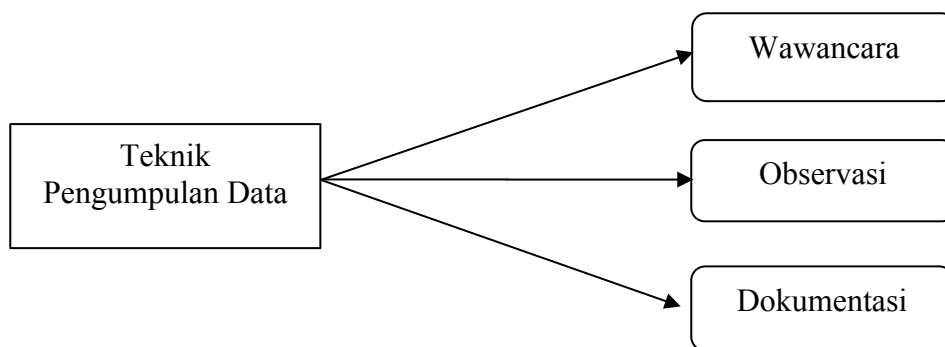
Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan juga standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut (Sugiyono, 2019) bahwa tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengajukan pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasilnya merupakan data primer. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan wawancara semi terstruktur dimana peneliti memiliki panduan wawancara yang digunakan untuk mengungkapkan beberapa pertanyaan namun masih bisa berkembang di lapangan. Wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden di mana peneliti membuat kerangka.
2. Observasi. Peneliti datang ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. Peneliti

menggunakan teknik observasi tak berperan yaitu dalam proses pengambilan data peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan.

3. Dokumentasi. Pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara melihat kembali berbagai literatur, foto dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik pengambilan data dengan dokumentasi yang berupa data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Berikut bentuk gambar teknik pengumpulan data dalam bermacam-macam sumber data sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
(satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A, B, C)

G. Teknis Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2019), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan diperelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2019), terdapat tiga komponen analisis data, yaitu:

1. Pengumpulan Data

- a. Data Primer. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara mendalam kepada informan kunci, utama dan pendukung.
- b. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang tercatat pada kampung KB Long Melaham.

2. Reduksi Data.

Reduksi data diartikan proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Data yang ada di lapangan kemudian dirangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam tahap ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian pelaksanaan program Kampung KB dan mana yang bukan, kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan program Kampung KB Batew Teneveng di Kampung Long Melaham.

3. Penyajian Data.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.

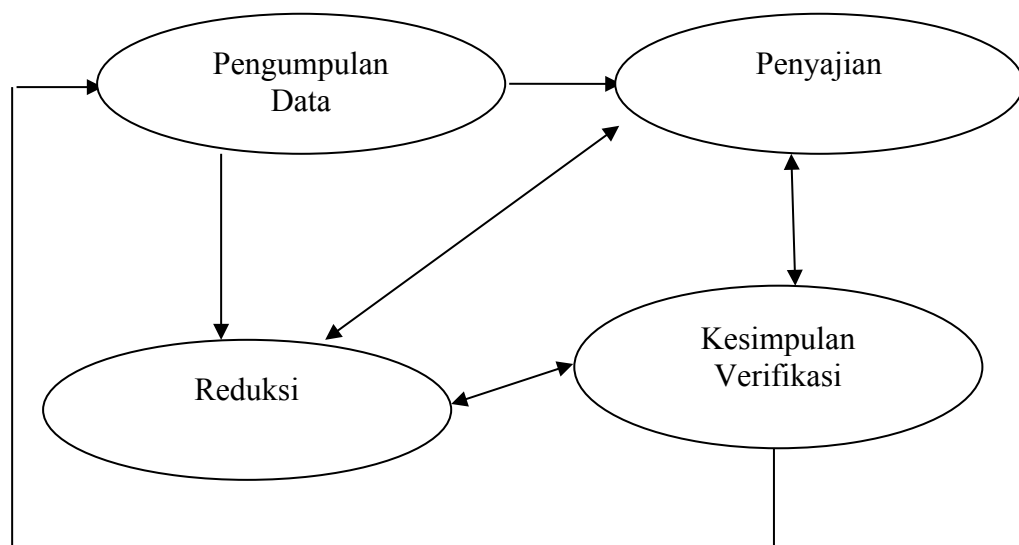
4. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan

dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Ketiga macam kegiatan analisis yang dipaparkan di atas, saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan. Jadi analisis adalah kegiatan yang terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Sehingga, data yang diperoleh tidak timpang atau berat sebelah karena antara data yang satu dengan yang lain saling terkait.

Berikut ini penjelasannya:



Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data

Metode Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, 2019).

H. Jadwal Penelitian

Rencana jadwal penelitian yang dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai dengan uji pendadaran dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Nov -Des 2023	Jan 2024	Feb- Jun 2024	Juli- Okt 2024	Nov 2024	Jan- Feb 2025
1	Pengajuan judul, penyusunan dan konsultasi proposal.						
2	Seminar proposal						
3	Revisi proposal						
4	Penelitian						
5	Pengolahan data dan konsultasi						
6	Seminar hasil dan revisi						
7	Pendadaran						

I. Operasionalisasi

Operasionalisasi merupakan salah satu instrument dari riset karena merupakan salah satu tahapan dalam proses mengumpulkan data. Operasionalisasi pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Operasionalisasi

Tujuan Penelitian	Dimensi Penelitian	Domain	Sumber Data	Sistem Pengumpulan Data
Bagaimana anggaran dana dalam implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham.	1. Anggaran Dana	1. Alokasi dana 2. Biaya operasional 3. Pengawasan	Informan kunci, informan utama dan informan pendukung	Wawancara Dokumentasi

bagaimana pengetahuan petugas dalam implementasi pengolahan rumah data kependudukan di kampung KB Long Melaham	2. Pengetahuan	1. Jumlah SDM 2. Sikap 3. Keterampilan	Informan kunci, informan utama dan informan pendukung	Wawancara, Dokumentasi
--	----------------	--	---	------------------------

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Batew Teneveng

1. Sejarah Kampung

Desa Long Melaham berdiri menjadi pemerintahan Desa sejak tahun 1990. Desa Long Melaham konon menurut cerita para sesepuh desa, berasal dari saat panen raya ada orang menyembelih ayam untuk dibuat ayam Long Melaham, kemudian pada saat upacara, ayam Long Melaham itu dicuri burung gagak dan dibawa terbang ke pohon randu. Pada awalnya desa Long Melaham dinamakan Randu Long Melaham, namun akhirnya sekarang terkenal dengan nama Kampung Long Melaham.

Terkait hal ini, kampung Long Melaham awal mulanya dihuni beberapa warga Kayan Lung Metun dan tinggal di ilir sungai Melaham, sehingga dalam bahasa daerah setempat (Kayan Lung Metuno Long / Lung artinya Iliir, sedangkan Melaham adalah nama sebuah sungai, yaitu sungai Melaham. Dikenal sekarang dengan nama Kampung Long Melaham. Namun sekarang pada konon nyata Kampung Long Melaham saat ini berada di hulu Sungai Melaham.

Adapun urutan kepemimpinan kampung Long Melaham terdahulu sampai yang memimpin sampai sekarang adalah seagai berikut :

Tabel 4.1: Data Pemimpin di Kampung Long Melaham

a.	Nalau Ding	:	Tahun 1975 sampai dengan 1980
b.	Philipus Kuhi	:	Tahun 1980 sampai dengan 1986
c.	Philipus Kuhi	:	Tahun 1986 sampai dengan 1991
d.	Philipus Kuhi	:	Tahun 1991 sampai dengan 1996
e.	Daniel Ding Unyang	:	Tahun 1996 sampai dengan 2003
f.	Awang Nyangun	:	Tahun 2004 sampai dengan 2008
g.	Hironimus Kerung	:	Tahun 2008 sampai dengan 2014
h.	Awang Nyangun	:	Tahun 2014 sampai dengan 2020

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Adapun fungsi dan tugas pokok dan fungsi masing-masing kelembagaan adalah sebagai berikut :

a. Petinggi Kampung

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah kampung.
- 7) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi wewenang kampung.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat di kampung.
- 13) Membina, menggayomi dan melestarikan nilai sosial, budaya, dan adat istiadat.
- 14) Memberdayakan masyarakat dengan kelembagaan kampung.
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan kehidupan.

b. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

- 1) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
- 5) Memproses pemilihan Petinggi kampung.
- 6) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan kelembagaan masyarakat.

c. Sekretaris Kampung

- 1) Membantu petinggi dalam hal Administrasi Pemerintahan.
- 2) Menginventarisir aset-aset dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan.
- 3) Membina lembaga/ organisasi yang dibentuk oleh petinggi.
- 4) Memberi pertimbangan keputusan kepada petinggi dalam hal prinsip.
- 5) Merencanakan rencana kerja petinggi dan staf.
- 6) Bertanggung jawab atas jalannya pelayanan dasar masyarakat selaku Kepala Sekretaris Kampung.

d. Bendahara Kampung

- 1) Membantu petinggi dalam Keuangan Pemerintahan.
- 2) Membuat laporan Keuangan Pemerintahan.
- 3) Memberi saran/pendapat petinggi dalam hal penganggaran dan belanja kampung.
- 4) Bertanggung jawab atas laporan Keuangan.

3. Kondisi Kampung

a. Aspek Geografis

Kampung Long Melaham merupakan salah satu kampung yang terletak dalam satuan wilayah kecamatan Long Bagun, Kabupaten

Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur dengan batasan wilayah kampung tersebut sebagai berikut :

- 1) Batas Utara : Kampung Ujoh Bilang
- 2) Batas Selatan : Kampung Mamahak Besar
- 3) Batas Barat : Kampung Ujoh Bilang
- 4) Batas Timur : Kampung Mamahak Besar

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kampung Melaham, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu adalah 8.529 Ha.

c. Orbitasi

Tabel 4.2 Data Orbitasi Kampun Melaham

No.	Uraian	Jarak Tempuh	Ket. Transportasi
1.	Kampung ke Kecamatan	40 menit	Kendaraan motor atau mobil
2.	Kampung ke Kabupaten	40 menit	Kendaraan motor atau mobil
3.	Kampung ke Ibu Kota Provinsi	24 jam	Kapal motor

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Deskripsi Data Penelitian

Data yang disajikan di bawah ini merupakan data yang sudah melalui proses reduksi. Deskripsi data menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Analisis adalah kegiatan yang terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Sehingga, data yang diperoleh tidak timpang atau berat sebelah karena antara data yang satu dengan yang lain saling terkait. Mengingat bahwa jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data atau hasil dokumentasi lainnya.

2. Karakteristik Informan

Adapun penyajian data berisikan tentang data mengenai informan penelitian serta data variabel penelitian penyajian data mengenai hasil wawancara adalah untuk mengetahui hasil dari informan penelitian yang terdiri dari 1 orang informan kunci yaitu penyuluh Keluarga Berencana kampung KB Batew Teneveng Long Melaham, 1 orang informan utama yaitu Ketua Rumah Data Kependudukan kampung KB Batew Teneveng Long Melaham dan 1 orang informan pendukung adalah Kader Rumah Data Kampung KB Batew Teneveng Long Melaham. Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data Informan Penelitian

No	Kode	Umur	Jabatan
1	W-A1-YH	48	Penyuluh KB
2	W-A2-LM	51	Ketua RDK Long Melaham
3	W-A3-NH	32	Kader KB

Sumber: Data Primer 2024

Data-data yang diperoleh penulis melalui data primer akan penulis sajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan kenyataan di lapangan, adapun data-data primer tersebut merupakan narasi hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi pengolahan Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham KB Batew Teneveng Long Melaham.

a. Informan kunci:

Wawancara pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2024 bertempat di Rumah Data Kependudukan kampung Batew Teneveng Long Melaham dengan informan kunci ini ibu W-A1-YH adalah seorang penyuluh pengolahan Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Kampung KB, peneliti menanyakan kepada Ibu W-A1-YH tentang terkait dana yang ada di Rumah Data Kependudukan itu seperti apa?

“Ya kalau sementara ini tadi kan baru sekali menerima dana dan dana itu dipergunakan eh keperluan rumah data. Kemarin itu kami pergunakan untuk papan data, cat dan sebagainya yang sementara kami terima”.

Dalam melaksanakan suatu program pasti menggunakan anggaran dana. Peneliti bertanya kepada Ibu W-A1-YH, dananya itu bersumber dari mana dan siapa yang bertanggung jawab?

“Yang kemarin itu dari BKKBN provinsi”. “Untuk eh untuk itu sih sumbernya bisa dari ADD atau alokasi dana desa, bisa juga dari APBD, APBN, terus bantuan swasta ataupun perusahaan baik bantuan langsung ataupun melalui CSR gitu”.

“Untuk bertanggung jawab atas dana tersebut ya petingnya langsung”.

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana dukungan Pemerintah mengenai dana yang dianggarkan dalam pembentukan Rumah Data Kependudukan?, maka beliau menjawab:

“Ya untuk Pemerintah itu sebenarnya sudah sangat mendukung Cuma tidak lanjut dalam mengeluarkan dana tersebut kebutuhan rumah data tidak sama sekali sampai sekarang ini”.

Peneliti selanjutnya bertanya bagaimana dana yang dikeluarkan untuk operasional dan honor rumah data itu dari mana? Berikut penuturan dari Ibu W-A1-YH:

“Eh sejauh ini sih dari swadaya kadernya saja seperti keperluan ATK yang dibutuhkan saat ini, klo dana lainnya belum ada, dan untuk sampai saat ini tu belum ada, sampai saat ini, karena kadernya itu kebanyakannya kerjanya kerja sosial, tidak menuntut juga karena memang dananya tidak ada”.

Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang dari mana dana didapat ketika pembentukan Rumah Data Kependudukan? Beliau menjawab:

“Klo saya sendiri sih belum tau berapa dana yang dibutuhkan. Iya pas pembentukan itu ya memang tidak ada karena pembentukan secara simbolis aja karena bersamaan dengan pembentukan kegiatan kampung KB waktu itu”.

Kemudian peneliti menanyakan kendala apa aja yang ada dalam pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan? Beliau menjawab:

“Kendalanya sih ada tapi gak tau ya alasannya kendala itu apa gitu, belum tau kendalanya seperti apa sehingga dananya belum keluar”.

Untuk wawancara selanjutnya mengenai pengetahuan peneliti bertanya di Rumah Data Kependudukan ini siapa aja yang bertanggung jawab, berapa orang jumlah pegawai dan apa tujuan dibentuknya Rumah Data Kependudukan ya bu?

”Yang bertanggung jawab dalam kegiatan RDK ini adalah ketua RDK, P2KB, dan kadernya”.

“Kemarin sih ada 4 orang eh 2 lah kemarin kan semuanya ada 4 kemarin itu ketua, penyuluh sama kader”.

“Sebagai pusat pengelola data kampung KB, supaya mengetahui permasalahan yang ada di kampung KB Long Melaham”.

Kemudian peneliti kembali bertanya apa aja kegiatan di Rumah Data Kependudukan serta laporan bulan diserahkan sama siapa?

“Untuk kegiatannya sih ada pendataan keluarga, ada kependudukan terus eh mengolah data stunting terus data PUS, WUS, eh balita dan lansia gitu. Klo di rumah data itu sih eh tidak ada pelayanan Cuma ada kegiatan semacam pengolahan data itu tadi yang sudah disebutkan

“Itu langsung di bawa ke petinggi bu”

Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang bagaimana profesionalisme petugas atau penyuluh dan pengetahuan yang dimiliki petugas yang dilakukan di Rumah Data dalam memberikan informasi kepada masyarakat? Beliau menjawab:

“Ya kami sebagai kader atau petugas tetap professional tetap melakukan kegiatan terkait dengan laporan yang diperlukan di rumah data misalnya melakukan pengolahan data, terus kami berusaha menjalankan kegiatan terkait laporan yang diperlukan walaupun banyak kendala tetap berusaha mencari solusi agar kegiatan yang di rumah data berjalan dengan lancar”.

“Untuk pengetahuan sih kami cukup ya mengetahui seperti melakukan kegiatan laporan rutin tetap dijalankan walaupun kurang dukungan dari Pemerintah kampung, kami tetap menjalankan dengan sabar”.

b. Informan utama

Wawancara pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2024 bertempat di Rumah Data Kependudukan kampung Batew Teneveng Long Melaham dengan informan kunci ini bapak W-A2-LM adalah Ketua Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Kampung KB, peneliti menanyakan kepada bapak W-A2-LM tentang terkait dana yang ada di Rumah Data Kependudukan itu seperti apa?

“Terkait dana yang ada di Long Melaham ini selama kurang lebih 2 tahun saya menjabat sebagai ketua RDK belum ada dana riil yang kami terima. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang dana bu, terima kasih”.

Dalam melaksanakan suatu program pasti menggunakan anggaran dana. Peneliti bertanya kepada bapak W-A2-LM, dananya itu bersumber dari mana dan siapa yang bertanggung jawab?

“Berkaitan dengan sumber dana untuk dana rumah data kependudukan itu bisa diambil dari dana desa dan yang bertanggung jawab atas dana tersebut ya kepala desa setempat yang nantinya dikucurkan kepada pengurus rumah data”.

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana dukungan Pemerintah mengenai dana yang dianggarkan dalam pembentukan Rumah Data Kependudukan?, maka beliau menjawab:

“Menurut informasi yang pernah disampaikan oleh petinggi pemegang kampung Long Melaham beliau sangat mendukung tentang RDK dan siap untuk membantu dengan dana yang sesuai namun pada kenyataannya belum ada gitu. Mudah-mudahan saja hal ini bisa diselesaikan oleh petinggi Long Melaham. Klo dukungan sangat mendukung petinggi”.

Peneliti selanjutnya bertanya bagaimana dana yang dikeluarkan di rumah data untuk apa saja? Berikut penuturan dari bapak W-A2-LM:

“Seperti yang saya katakan tadi bu karena belum pernah ada dana yang kami terima riil dan tunai maka untuk penggunaan dana saya tidak berani mengatakan untuk apa saja penggunaannya, namun sepengetahuan saya tidak ada dana yang diberikan dari Desa yang dikucurkan kepada rumah data ya tentunya dana-dana tersebut dipergunakan sebagai operasional saja misalnya mungkin bisa digunakan untuk transportasi anggota-anggota, teman-teman rumah data itu pada saat ada kegiatan itu persentase di Kabupaten atau di kampung sendiri ataupun kecamatan, atau di Dinas Kesehatan. Lalu bisa juga dana tersebut digunakan untuk membeli keperluan-keperluan atk, itu saja sih bu terkait dana tapi karena memang belum ada dana yang diserahkan secara langsung ke kami dan pengelolaannya jua belum kami lakukan, demikian bu terima kasih”.

Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang dari mana dana didapat ketika pembentukan Rumah Data Kependudukan? Beliau menjawab:

“Klo estimasi saya sih 75 juta bu untuk pembentukan rumah data itu ya seperti atk, untuk operasional dan sebagainya itu dana awal. Estimasi saja sih belum bisa kita tentukan karena kita juga belum hitung secara riil apa yang diperlukan, begitu bu”.

Kemudian peneliti menanyakan kendala apa aja yang ada dalam pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan? Beliau menjawab:

“Menyangkut dana selama kurang lebih 2 tahun saya menjabat sebagai ketua RDK ini belum ada dikucurkan dana jadi kendalanya ya itu belum ada dikucurkan, mau ngomong kendalanya apa lagi bu saya gak tau lagi apa. Mungkin juga kita belum buat laporan yang fix ke pihak petinggikah atau gimana kah atau juga kami hanya sebagai petugas RDK hanya sebatas wacana sebatas bincang pertemuan”.

Untuk wawancara selanjutnya mengenai pengetahuan peneliti bertanya bagaimana pengetahuan bapak tentang Rumah Data Kependudukan dan tujuan dibentuknya RDK ini pak?

”Rumah data kependudukan ini dibentuk untuk pendataan penduduk supaya mengetahui keberadaan penduduk, kesehatan, masyarakat setempat, apakah masyarakat sehat sesuai dengan harapan dari Pemerintah apakah ada masyarakat yang kurang gizi, *stunting*, sudah cukup sejahtera atau tidak. Itu yang saya tau berkaitan dengan rumah data secara umum bu, terimakasih”.

“Dilihat dan ditelusuri dengan baik fungsi rumah data kependudukan ini adalah sebagai pusat data dan informasi permasalahan kependudukan, kb dan pembangunan keluarga, sebagai pusat integrasi aktivitas kampung KB. Ketersediaan statistik handal yang disediakan”.

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah sumber daya yang ditempatkan di Rumah Data sudah tercukupi pak?

“Sudah cukup kemaren bu, sesuai aja dengan arahan pihak provinsi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu”.

Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh petugas atau penyuluh tentang informasi Rumah Data Kependudukan dalam pemberian informasi kepada masyarakat? Beliau menjawab:

“Sejauh ini para narasumber yang datang menyuluh kepada masyarakat dari Dinas Kesehatan itu ya menurut saya sih sangat kompeten dalam penyampaian mereka terkait rumah data bu”.

“Pengelolaan data secara khusus lalu pendataan tentang situasi dan kondisi kesehatan dikampung setempat khususnya menyangkut stunting, itu yang yang saya tau bu”.

Kemudian peneliti kembali bertanya bagaimana kelengkapan fasilitas di Rumah Data Kependudukan?

“Hanya ada beberapa alat dapur sih bu, belum ada peralatan yang lengkap bu itu. Hanya ada papan, papan data pun belum ada, belum ada sih bu belum lengkap. Semoga saya nanti melengkapinya nanti. Saya akan berkoordinasi dengan petinggi bagaimana caranya lagi untuk melengkapi fasilitas di RDK itu nanti bu”.

“Sejauh ini bu pendataan RDK ini berjalan dengan lancar bu karena ya terus terang aja fasilitas yang digunakan ya fasilitas pribadi seperti laptop, printer dan lain sebagainya. Ini yang pergi mendata ya pakai motor sendiri, BBM sendiri, ya semua kita lakukan dan teman-teman lakukan demi kampung bu. Mudah-mudahan saja nanti setelah ada koordinator bisa ada perubahan-perubahanlah. Lalu fasilitas seperti papan data itu sudah dipasang oleh teman-teman dari Dinkes kemarin membantu, itu ada disekretariat rumah data itu walaupun ia masih berupa kertas di papan itu namun sudah lumayan bisa kita ambil dokumentasi”.

Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang bagaimana tupoksi bapak di Rumah Data dalam memberikan informasi kepada masyarakat? Beliau menjawab:

“Bekerja sama dengan anggota lainnya untuk mendata data kependudukan dikampung dan mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi dimasyarakat khususnya dibidang kesehatan apakah ada gejala stunting, kurang gizi perlu adanya makanan tambahan dan memperhatikan situasi lingkungan kesehatan kebersihan lalu mendata bersama rekan-rekan rumah dataku sebagai laporan ke Dinas terkait untuk ditindak lanjuti klo ada hal-hal yang memungkinkan terjadinya masalah kesehatan disuatu kampung”.

c. Informan pendukung

Wawancara pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2024 bertempat di Rumah Data Kependudukan kampung Batew Teneveng Long Melaham dengan informan pendukung ini ibu W-A3-NH adalah seorang kader Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Kampung KB, peneliti menanyakan kepada Ibu W-A3-NH tentang terkait dana yang ada di Rumah Data Kependudukan itu seperti apa?

“Bersumber dari swadaya masyarakat, alokasi dana desa, APBD, APBM dan bantuan swasta atau perusahaan baik melalui bantuan langsung maupun CSR.”.

Dalam melaksanakan suatu program pasti menggunakan anggaran dana. Peneliti bertanya kepada Ibu W-A3-NH, dananya itu untuk apa dan siapa yang bertanggung jawab?

“Untuk operasional rumah data, sejauh ini masih dari swadaya kader aja untuk keperluan atk yang dibutuhkan saat ini. klo dana yang lainnya itu belum ada.”.

“Yang bertanggung jawab itu petinggi langsung bu”.

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana dukungan Pemerintah mengenai dana yang dianggarkan dalam pembentukan Rumah Data Kependudukan?, maka beliau menjawab:

“Pemerintah itu sebenarnya sudah sangat mendukung cuman tidak ada tindak lanjut dalam mengeluarkan dana untuk kebutuhan rumah data dan belum ada sama sekali sampai saat ini”.

Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang dari mana dana didapat dan alokasi dana ketika pembentukan Rumah Data Kependudukan? Beliau menjawab:

“Belum tau karena belum pernah ada, dan sama sekali belum ada dana begitu bu ya”.

“Klo saya sendiri belum tau berapa dana yang dibutuhkan”.

“Pas pembentukan tadi secara simbolis aja karena bersamaan dengan pembentukan kampung KB”.

Kemudian peneliti menanyakan kendala apa aja yang ada dalam pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan? Beliau menjawab:

“Belum tau kendala karena memang belum ada penganggaraan sampai sekarang”.

Untuk wawancara selanjutnya mengenai pengetahuan peneliti bertanya di Rumah Data Kependudukan ini siapa aja yang bertanggung jawab, berapa orang jumlah pegawai dan apa tujuan dibentuknya Rumah Data Kependudukan ya bu?

”Yang bertanggung jawab Kepetinggi, ke Dinkes, P2KB cc ke pengendalian kependudukan untuk laporan SIGA (Sistim Informasi Keluarga)”.

“Ada 4 orang, 1 ketua RDK, 2 PKB, 3 kadernya 2 orang”.

“Sebagai pusat pengelola data kampung KB, supaya mengetahui permasalahan yang ada di kampung KB Long Melaham”.

Kemudian peneliti kembali bertanya apa aja kegiatan di Rumah Data Kependudukan serta laporan bulan diserahkan sama siapa?

“Semacam kegiatan pendataan data keluarga, data kependudukan, *stunting*, PUS, WUS, bayi balita dan lansia”. Dan itu langsung di bawa ke petinggi bu”.

Lebih lanjut informan pendukung menyatakan bahwa data ini bisa meliputi kegiatan seperti data kunjungan Posyandu yang ada di Posyandu Batu Teneveng. Data tahun 2024 ini kunjungan di bulan Januari ada sebanyak 37 orang, bulan Februari 42 orang, bulan Maret 16 orang, bulan April 22 orang, bulan Mei 37 orang, bulan Juni 25 orang, bulan Juli 29 orang, bulan Agustus 48 orang, bulan September 39 orang, bulan

Oktober 30 orang, bulan November 40 orang, dan bulan Desember 35 orang. Rata-rata kunjungan Posyandu Batu Teneveng dalam satu bulan berjumlah 33 orang

Selain data tentang kegiatan kunjungan posyandu, Rumah Dataku juga mempunyai informasi mengenai Kesehatan Masyarakat seperti Pengendalian dan Pemberantasan penyakit Malaria, pada tahun 2023, Kasus DBD terjadi di 6 Puskesmas, kasus tertinggi di Puskesmas Ujoh Bilang terdapat 117 kasus, dan kasus terendah di Puskesmas Laham terdapat 4 kasus, Puskesmas Long Hubung 22 kasus, Puskesmas Long Pahangai 11 kasus, Puskesmas Tiong Ohang 11 kasus dan Puskesmas Mamahak Besar 40 tidak terdapat kasus. Dan kasus meninggal terdapat di Puskesmas Ujoh Bilang sebanyak 2 kasus.

Kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana profesionalisme petugas atau penyuluh dan pengetahuan yang dimiliki petugas yang dilakukan di Rumah Data dalam memberikan informasi kepada masyarakat? Beliau menjawab:

“Sudah professional petugas atau penyuluh tetap melakukan kegiatan terkait rumah data misalnya melakukan pengolahan data, menjalankan kegiatan terkait laporan yang diperlukan dirumah data walaupun banyak kendala tetap berusaha mencari solusi agar berjalan dengan lancar”.

“Cukup mengetahui seperti laporan rutin tetap dijalankan walaupun kurang dukungan dari Pemerintah kampung”.

Peneliti selanjutnya bertanya bagaimana fasilitas yang ada di Rumah Data Kependudukan ini? Berikut penuturan dari Ibu W-A3-NH:

“Tidak ada fasilitas apa pun di RDK ini, masih kosong melompong, he,,,he..

Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang bagaimana tupoksi ibu di Rumah Data dalam memberikan informasi kepada masyarakat? Beliau menjawab:

“Tupoksi saya sebagai kadernya yang mendata langsung ke masyarakat jadi saya mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data”.

C. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dan keterbaharuan data yang ada Kampung KB Bateu Teneveng Long Melaham dan Rumah Dataku di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan Rumah Dataku di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu antara lain: keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya (sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung), belum optimalnya koordinasi, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Beberapa upaya yang dapat ditempuh Pemerintah Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain mengadakan kompetisi Kampung KB, menyelenggarakan KKN Tematik, membuat aplikasi untuk Rumah Dataku, meningkatkan peran Pokja Kampung KB, hingga pelatihan untuk pengurus dan penyuluh KB.

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang terkait dalam penelitian ini, penulis mendapat hasil tentang penelitian yang mengenai Analisis implementasi pengolahan Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran Dana

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget)

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen.

Anggaran dana adalah perencanaan terhadap sejumlah dana yang disusun secara sistematis. Berbeda dengan neraca keuangan, perencanaan ini dibuat berdasarkan aktivitas perusahaan dalam periode tertentu di masa mendatang.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Didalam aturan ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah di arahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan pada pasal 371 ayat 1 yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kab/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menekankan desa tidak dianggap lagi sebagai objek pembangunan, melainkan di posisikan menjadi subjek sekaligus ujung tombak pembangunan. Untuk dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Desa tersebut, melalui pembangunan dan pemberdayaan tentunya perlu di dorong oleh bantuan dana, untuk itu pemerintah pusat melalui APBN memberikan suntikan dana kepada desa dengan dana desa yang di harapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa untuk anggaran dana dalam implementasi pengolahan Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham KB Batew Teneveng Long Melaham belum ada dana yang

diberikan terkait pengolahan Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kustanto, Fitriyatus, & Utami, 2020), dengan judul Tantangan pengembangan Rumah Dataku di Kabupaten Sidoarjo, hasil penelitian yang menyatakan bahwa tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan Rumah Dataku di Kabupaten Sidoarjo antara lain keterbatasan anggaran.

Hal ini didukung dengan pernyataan hasil wawancara dari ketiga informan dalam penelitian bahwa mulai pembentukkan Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham ini tidak pernah ada dana yang diberikan baik secara langsung atau tidak langsung. Sebagai informan utama dalam hal ini Ketua Rumah Data Kependudukan menyatakan bahwa dana yang ada di Long Melaham ini selama kurang lebih 2 tahun beliau menjabat belum ada dana riil yang mereka terima. Jadi beliau ketika diwawancara tidak bisa mengatakan apa-apa tentang dana. Lanjut beliau juga mengatakan menurut sepengetahuannya tidak ada dana yang diberikan dari Desa yang dikucurkan kepada rumah data. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh (Syahra Sonia Andhiki et al., 2022), tentang implentasi Program Kampung KB dan dampak terhadap capaian MKJP di Kampung KB Desa Sumberjaya, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, yang mana menyatakan program Kampung KB di Desa Sumberjaya Kecamatan Gondanglegi distribusi tenaga PLKB/Sub PPKBD/kader yang belum mencukupi, dukungan dana yang belum adanya kebijakan, dan kepercayaan masyarakat terhadap MKJP yang rendah.

Berdasarkan hasil wawancara lebih mendalam, peneliti mendapatkan informasi bahwa dana yang digunakan dalam kegiatan kampung KB ini khususnya kegiatan Rumah Data Kependudukan ini berasal dari Pusat Bantuan Operasional Kampung KB (BOKB). Bantuan Operasional Kampung KB ini sendiri merupakan dana yang diberikan kepada setiap Desa yang kemudian didistribusikan dalam berbagai macam kegiatan seperti kegiatan pembinaan keluarga balita, lansia, remaja, kemudian kegiatan

berupa pembinaan keluarga sejahtera (kerajinan tangan, memasak, mengolah aneka cemilan), dan yang terakhir salah satunya adalah kegiatan pembuatan Rumah Data Kependudukan yang dikelola sebagai tempat penyampaian informasi. Pernyataan ini juga dilontarkan oleh informan kunci dan pendukung yang menyebutkan bahwa sumber dana yang selama ini digunakan itu bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), bisa juga dari APBD, APBN, terus bantuan swasta ataupun perusahaan.

Dalam hal ini dukungan Pemerintah sangat mendukung sekali, walaupun dengan dana yang terbatas dari pusat tetapi kegiatan Rumah Data Kependudukan masih tetap berjalan, dengan mengandalkan sebagian dana operasional dari swadaya kader. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan pendukung yang menyatakan bahwa untuk sampai saat ini dana tidak ada karena kader-kader yang ada di Rumah Data Kependudukan selama ini kerjanya bersifat kerja sosial saja dan tidak menuntut karena memang dananya tidak ada.

Dalam pembentukan Rumah Data Kependudukan ini hanya bermodalkan kucuran dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang semua itu untuk membiayai operasional serta memfasilitasi keperluan yang dibutuhkan dalam Rumah Data Kependudukan. Terlebih lagi untuk hal pendataan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan yang menyatakan bahwa fasilitas yang digunakan itu berasal dari milik pribadi pengurus seperti laptop, printer, motor, dan lain-lain. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kustanto, Fitriyatus, & Utami, 2020) yang menyebutkan bahwa pengembangan Rumah Data di Kabupaten Sidoarjo bahwa keterbatasan sumber daya (sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung), belum optimalnya koordinasi, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan kunci, utama, pendukung dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anggaran dana yang ada dalam Rumah Data Kependudukan ada yang berasal dari Bantuan Operasional Kampung KB (BOKB) dan bantuan sosial dari kader-kader

yang ada di Rumah Data Kependudukan sebagai petugas yang bekerja di Rumah Data Kependudukan.

2. Pengetahuan

Sumber daya manusia memiliki peran besar dalam menentukan maju atau berkembangnya organisasi. Oleh karena itu, kemajuan organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi akan semakin baik pula kinerja yang dihasilkan oleh sumber daya manusia atau karyawan dalam bekerja. Setiap organisasi perlu meningkatkan sumber daya manusianya supaya kinerja yang dihasilkan meningkat, karena organisasi yang maju adalah organisasi yang menampilkan kinerja yang baik.

Pengetahuan (*knowledge*) adalah kemampuan individu untuk mengingat kembali (*recall*) atau mengenali kembali nama, kata, inspirasi, rumus, dan sebagainya. (Widyawati, 2020). Pengetahuan merupakan hasil dari mengetahui dan akan terjadi pada saat penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan diperoleh dari penginderaan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. (Tumanduk et al., 2022).

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan pada Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham, sebagai organisasi yang merupakan program Pemerintah yang memberikan kewenangan yang lebih besar untuk menyusun perencanaan pembangunan dan menentukan apa yang terbaik untuk wilayahnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah menganalisa terkait dengan pengetahuan pengurus/ kader tentang pengertian apa itu Rumah Data Kependudukan, bagaimana cara mendata keluarga, kesiapan ketika terjun ke masyarakat dalam penyuluhan, pengetahuan, dan sumber daya yang ada serta pelaporan hasil kerja sudah dilakukan dengan baik.

Hal ini sesuai pula dengan pernyataan salah satu informan pendukung yang menyatakan bahwa untuk pengetahuan mereka cukup mengetahui seperti melakukan kegiatan laporan rutin, pendataan keluarga tetap dijalankan walaupun kurang dukungan dari Pemerintah kampung.

Di dalam melakukan tugas para pengurus/ kader Rumah Data Kependudukan selalu memberikan yang terbaik dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan kunci yang mengatakan bahwa mereka sebagai kader atau petugas selalu professional tetap melakukan kegiatan terkait dengan laporan yang diperlukan di rumah data misalnya melakukan pengolahan data, kemudian mereka berusaha menjalankan kegiatan terkait laporan yang diperlukan walaupun banyak kendala tetap berusaha mencari solusi agar kegiatan yang di rumah data berjalan dengan lancar.

Pengumpulan hasil laporan yang dapat dipertanggung jawab juga mereka kerjakan dengan baik walaupun fasilitas yang ada di Rumah Data Kependudukan sangat terbatas bahwa seadanya. Hal ini tidak membuat mereka putus asa. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan utama bahwa pendataan Rumah Data Kependudukan ini berjalan dengan lancar biarpun fasilitas yang digunakan menggunakan fasilitas pribadi demi kelancaran pekerjaan. Selain itu menurut informan pendukung menyatakan bahwa tidak ada fasilitas apa pun di Rumah Data Kependudukan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Ari et al., 2021), yang menunjukkan bahwa pembenahan dan pendampingan ini memberikan manfaat bagi pengurus Rumah Data dan Kampung KB dimana para pengurus mendapatkan pemahaman yang lebih dalam akan inputting data secara digital dengan didukung oleh kelengkapan format data yang ada, tersedianya tempat untuk melakukan verifikasi, analisis dan pengarsipan data serta adanya media promosi kegiatan dan potensi wisata yang ada di Kauman Kidul.

Maka berdasarkan hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan yang dimiliki petugas/ pengurus Rumah Data Kependudukan cukup baik dimana dalam hal mendata keluarga, pengolahan data serta laporan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan dengan petinggi kampung. Keterbatasan fasilitas di Rumah Data Kependudukan sangat terbatas tapi mereka bekerja dengan professional walaupun dengan fasilitas pribadi dan fasilitas ala kadarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta dokumen-dokumen yang didapatkan, peneliti mendapatkan kesimpulan terkait penelitian mengenai Analisis implementasi pengolahan Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di dapat hasil:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan kunci, utama, pendukung dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anggaran dana yang ada dalam Rumah Data Kependudukan ada yang berasal dari Bantuan Operasional Kampung KB (BOKB) dan bantuan sosial dari kader-kader yang ada di Rumah Data Kependudukan sebagai petugas yang bekerja di Rumah Data Kependudukan.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan kunci, utama, pendukung dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang dimiliki petugas/ pengurus Rumah Data Kependudukan cukup baik dimana dalam hal mendata keluarga, pengolahan data serta laporan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan dengan petinggi kampung. Keterbatasan fasilitas di Rumah Data Kependudukan sangat terbatas tapi mereka bekerja dengan professional walaupun dengan fasilitas pribadi dan fasilitas ala kadarnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai penelitian tentang Analisis implementasi pengolahan Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham, maka saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana.

2. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi Rumah Data Kependudukan dengan Petinggi yang terkait diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Desa yang dikoordinasikan.
3. Perlunya ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang keadaan keluarga sehingga memudahkan pengurus/ kader dalam melakukan pendataan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, Y. S., Gari, W. W. T., Mardiyanto, M. D., Jessica, A., Wulandari, N., & Purnomo, D. (2021). Pendampingan Pembenahan dan Pengelolaan Rumah Dataku dan Informasi Keluarga Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kelurahan Kauman Kidul Salatiga. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 484–498. <https://doi.org/10.24246/jms.v1i32021p484-498>
- Aryanta, D., Darlis, A. R., & Mulyadi, Y. (2015). Perancangan dan Implementasi Sistem Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Dengan Menggunakan DSK-TMS320C6713. *Jurnal Elektro Dan Telekomunikasi Terapan (e-Journal)*, 2(2).
- Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M., & Rayhani, M. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10>
- Budiningsih, K. (2017). The implementation of land and forest fire management policy in South Sumatera Province. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(2), 165–186.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis*. Routledge.
- Elbadiansyah, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STMIK Widya Cipta Dharma.
- Fachrisa, M. P. N., Kurniawati, N. K., & Nesia, A. (2020). Strategi Komunikasi BKKBN Provinsi Banten Dalam Menanggulangi Stunting di Desa Bayumundu, Pandeglang. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 49–55. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7767>
- Hamdi, O., & Leite, F. (2014). Conflicting side of building information modeling implementation in the construction industry. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 6(3), 3013004.
- Hardiyatno, Y. (2023). Implementation of Mayor Regulation Number 30 of 2021 concerning Guidelines for the Delivery of Infrastructure, Facilities and

- Public Utilities for Housing and Residential Areas in Bengkulu City. *International Journal of Policy and Public Administration*, 4(1), 53–60.
- Haryati, S., Sukarno, S., & Purwanto, S. (2021). Implementation of online education during the global Covid-19 pandemic: Prospects and challenges. *Cakrawala Pendidikan*, 40(3), 604–612.
- Hasibuan. (2020). Bab ii kajianpustaka 2.1. *Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 9–32. <http://repository.stei.ac.id/8468/3/BAB2.pdf>
- Hayat, H., Malang, U. I., & Pendapatan, P. (2018). Buku Kebijakan Publik. *Universitas Islam Malang Malang, Indonesia*.
- Huntington, S. P. (2015). *Kampf der Kulturen: Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert*. Goldmann Verlag.
- Kapioru, H. E. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 101–119.
- Kustanto, M. (2020). Tantangan Pengembangan Rumah Data Kependudukan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Borneo Akcaya*, 6(1), 58–73.
- Laswell, H. D. (n.d.). Abraham Kaplan 1950. *Power and Society*.
- Maldun, S. (2015). *Analisis implementasi kebijakan pemekaran daerah di kabupaten Mamuju Utara*.
- Mangkunegara, A. P., & Prabu, A. (2019). Manajemen SDM. *Remaja Rosdakarya*.
- Manna, Z. H., & Syafiie, I. K. (2014). Strategi Pemerintah Daerah Poso Periode 2010-2015 dalam Menghadapi Konflik Sosial. *Journal of Governance and Public Policy*, 1(2).
- Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008). Implementation of good governance by regional governments in Indonesia: the challenges. *Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management*.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (XXVII). *Bandung: Remaja Rosdakarya*.

- Nofriandi, R. (2017). *Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG. 800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa*. Universitas Medan Area.
- Nugroho, R. (2014). Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*.
- Nugroho, T. (2011). *ASI dan tumor payudara*.
- Parsons, W. (2001). Modernising policy-making for the twenty first century: the professional model. *Public Policy and Administration*, 16(3), 93–110.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Putri, V. S., & Oktora, S. I. (2020). Determinan Status Unmet Need for Limiting Birth Pada Wanita Usia Subur Berstatus Kawin Di Jawa Barat Tahun 2017. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(1), 85. <https://doi.org/10.14203/jki.v15i1.449>
- Rahman, H. M., & Indrawadi, J. (2019). Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(3), 295–301.
- Rianto, F., Nengsih, N. S., & Setyadiharja, R. (2019). Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Dimensi*, 8(2), 286–306. <https://doi.org/10.33373/dms.v8i2.2158>
- Sanjaya, W. (2015). *Perencanaan dan desain sistem pembelajaran*. Kencana.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Syahra Sonia Andhiki, Laksono Trisnantoro, & Dwi Handono Sulistyo. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Kampung Kb Kabupaten: Studi Kasus Kecamatan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)*, 23(04), 120–126. <https://doi.org/10.22146/jmpk.v23i04.4256>
- Taufik, M. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa.

Jurnal Kebijakan Publik, 4(2), 135–140.

- Teguh, S. A., & Rosidah, S. (2004). Manajemen sumber daya manusia: konsep, teori dan pengembangan dalam konteks organisasi publik. *Graha Ilmu*, Yogyakarta.
- Thomas, J. W., & Grindle, M. S. (1990). After the decision: Implementing policy reforms in developing countries. *World Development*, 18(8), 1163–1181.
- Tumanduk, E., Engkeng, S., Rudolf, F., & Maramis, R. (2022). Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Cuci Tangan pada Peserta Didik SD Negeri Powalutan Kabupaten Minahasa Selatan *Jurnal Kesmas*. *Jurnal Kesmas*, 12(1), 25–28.
- Widyawati, L. (2020). A systematic literature review of socially responsible investment and environmental social governance metrics. *Business Strategy and the Environment*, 29(2), 619–637.
- Zakki, M. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Sebagai Pembina Lembaga Kemasyarakatan LPM, RT, dan RW di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*. Universitas Islam Riau.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGOLAHAN RUMAH DATA
KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB LONG MELAHAM**

**A. Informan: Penyuluh Keluarga Berencana kampung KB Batew Teneveng
Long Melaham.**

B. Identitas Informan:

Hari/ Tanggal	:
Nama	:
Usia	:
Masa Kerja	:
Pendidikan	:

C. Daftar Pertanyaan

1. Dana:

- Apakah yang dimasuk dengan Rumah Data Kependudukan?
- Apa tujuan dibantuknya rumah data?
- Bagaimana dukungan Pemerintah mengenai dana yang dianggarkan dalam pembentukan Rumah Data Kependudukan?
- Berapa dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembentukan Rumah Data Kependudukan?
- Bagaimana alokasi dana yang diberikan dalam pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan?
- Apakah ada kendala dalam anggaran yang dikeluarkan?

2. Pengetahuan:

- Jenis pelayanan apa saja yang ada di Rumah Data Kependudukan?
- Siapa saja yang menjadi sumber daya di BKKBN pada Rumah Data Kependudukan?
- Apakah sumber daya yang ditempatkan di Rumah Data sudah tercukupi?
- Bagaimana profesionalisme petugas atau penyuluh yang dilakukan di Rumah Data dalam memberikan pelayanan?
- Bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh petugas atau penyuluh terkait dengan Rumah Data Kependudukan?
- Bagaimana kesiapan pengetahuan yang dimiliki oleh petugas atau penyuluh dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat?

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGOLAHAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB LONG MELAHAM

A. Informan: Ketua RDK Kampung KB Batew Teneveng Long Melaham

B. Identitas Informan:

Hari/ Tanggal	:
Nama	:
Usia	:
Masa Kerja	:
Pendidikan	:

C. Daftar Pertanyaan

1. Dana:

- a. Apakah yang dimasuk dengan Rumah Data Kependudukan?
- b. Apa tujuan dibantuknya rumah data?
- c. Bagaimana dukungan Pemerintah mengenai dana yang dianggarkan dalam pembentukan Rumah Data Kependudukan?
- d. Berapa dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembentukan Rumah Data Kependudukan?
- e. Bagaimana alokasi dana yang diberikan dalam pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan?
- f. Apakah ada kendala dalam anggaran yang dikeluarkan?

2. Pengetahuan:

- a. Bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh petugas atau penyuluh tentang informasi Rumah Data Kependudukan dalam pemberian informasi kepada masyarakat?
- b. Jenis pelayanan apa saja yang ada di Rumah Data Kependudukan?
- a. Siapa saja yang menjadi sumber daya di BKKBN pada Rumah Data Kependudukan?
- b. Apakah sumber daya yang ditempatkan di Rumah Data sudah tercukupi?
- c. Bagaimana profesionalisme petugas atau penyuluh yang dilakukan di Rumah Data dalam memberikan pelayanan?
- d. Bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh petugas atau penyuluh terkait dengan Rumah Data Kependudukan?
- e. Bagaimana kesiapan pengetahuan yang dimiliki oleh petugas atau penyuluh dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat?

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGOLAHAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB LONG MELAHAM

A. Informan: Kader Posyandu Kampung KB Batew Teneveng Long Melaham

B. Identitas Informan:

Hari/ Tanggal	:
Nama	:
Usia	:
Masa Kerja	:
Pendidikan	:

C. Daftar Pertanyaan

1. Dana:

- a. Apakah yang dimasuk dengan Rumah Data Kependudukan?
- b. Bagaimana dukungan Pemerintah mengenai dana yang dianggarkan dalam pembentukan Rumah Data Kependudukan?
- c. Berapa dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembentukan Rumah Data Kependudukan?
- d. Bagaimana alokasi dana yang diberikan dalam pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan?
- e. Apakah ada kendala dalam anggaran yang dikeluarkan?

2. Pengetahuan:

- a. Berapa jumlah orang petugas/ penyuluh yang terkait dengan informasi Rumah Data Kependudukan?
- b. Bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh kader posyandu tentang informasi Rumah Data Kependudukan dalam pemberian informasi kepada masyarakat?
- c. Jenis pelayanan apa saja yang ada di Rumah Data Kependudukan?
- f. Siapa saja yang menjadi sumber daya di BKKBN pada Rumah Data Kependudukan?
- g. Apakah sumber daya yang ditempatkan di Rumah Data sudah tercukupi?
- h. Bagaimana profesionalisme kader Posyandu yang dilakukan di Rumah Data dalam memberikan pelayanan?

- i. Bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh kader Posyandu terkait dengan Rumah Data Kependudukan?
- j. Bagaimana kesiapan pengetahuan yang dimiliki oleh kader Posyandu dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat?
- k. Bagaimana sikap kader Posyandu jika masyarakat kurang jelas mengenai informasi yang diberikan pada saat penyuluhan berlangsung ?

Lampiran 2

MASTER

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGOLAHAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB LONG MELAHAM TAHUN 2024

Informan : 1 (Kunci)
 Peneliti : Yurita
 Subjek : W-A1-YH (Pengurus Rumah Data Kependudukan Long Melaham)

Catatan Lapangan	Kode	Transkrip Wawancara
Anggaran Dana	P	Selamat pagi bu?
	W-A1-YH	Ya selamat pagi juga bu. Ada apa bu?
	P	Maaf mengganggu waktu bu ini
	W-A1-YH	Iya, santai aja. Jadi gimana ini bu?
	P	Jadi begini bu, perkenalkan nama saya Yurita, saya mahasiswa dari Widyagama. Saat ini saya mau mengadakan penelitian sebagai syarat Tugas Akhir dengan judul Analisis implementasi pengolahan Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham. Apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai sebagai informan kunci dalam penelitian saya ini?
	W-A1-YH	Ya, saya bersedia bu.
	P	Baik bu, silahkan perkenalkan biodata ibu?
	W-A1-YH	Nama saya Yohana Hanin, saya sebagai penyuluh
	P	Usia ibu berapa?
	W-A1-YH	48 tahun
	P	Lama bekerja berapa bu?
	W-A1-YH	Kurang lebih 2 tahun sudah berjalan
	P	Baik terima kasih
	P	Baik disini saya mau bertanya terkait dana yang ada di Rumah Data, eh bagaimana dana di RDK itu seperti apa bu?
	W-A1-YH	Ya kalau sementara ini tadi kan baru sekali menerima dana dan dana itu dipergunakan eh keperluan rumah data. Kemarin itu kami pergunakan untuk papan data, cat dan sebagainya yang sementara kami terima.

P	Itu dananya itu bersumber dari mana bu?
W-A1-YH	Yang kemarin itu dari BKKBN provinsi
P	Baik bu, terus penyaluran dana di rumah data kependudukan siapa yang bertanggung jawab?
W-A1-YH	Untuk bertanggung jawab atas dana tersebut ya petingginya langsung.
P	Baik bu, terus penyaluran dana di RDK itu bersumber dari mana saja ya bu?
W-A1-YH	Untuk eh untuk itu sih sumbernya bisa dari ADD atau alokasi dana desa, bisa juga dari APBD, APBN, terus bantuan swasta ataupun perusahaan baik bantuan langsung ataupun melalui CSR gitu
P	Terus apa yang dimaksud dengan Rumah Data Kependudukan
W-A1-YH	Yang dimaksud dengan RDK itu adalah pusat data kependudukan atau tempat pengolahan dan pemanfaatan data yang bersumber langsung dari dan oleh masyarakat kampung KB itu sendiri.
P	Kemudian bu apa tujuan dibuatnya RDK ini bu?
W-A1-YH	Ya tujuannya itu yang pertama itu sebagai tempat pusat pengolahan data pada kampung Batew Teneveng, terus yang kedua itu supaya mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di kampung kami Long Melaham tersebut.
P	Untuk ini ya bu untuk memecahkan permasalahan RDK ini
P	Baik ibu bagaimana dukungan Pemerintah mengenai dana yang dianggarkan dalam pembentukan Rumah Data Kependudukan?
W-A1-YH	Ya untuk Pemerintah itu sebenarnya sudah sangat mendukung cuman tidak lanjut dalam mengeluarkan dana tersebut kebutuhan rumah data tidak sama sekali sampai sekarang ini.
P	Untuk operasional rumah data itu dari mana bu?
W-A1-YH	Eh sejauh ini sih dari swadaya kadernya saja seperti keperluan ATK yang dibutuhkan saat ini, klo dana lainnya belum ada
P	Terus bu maaf bu ya klo honor eh RDK adakah bu?
W-A1-YH	Untuk sampai saat ini tu belum ada, sampai saat ini, karena kadernya itu kebanyakannya kerjanya kerja sosial, tidak menuntut juga karena memang dananya tidak ada.
P	Eh berapa dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembentukan Rumah Data

Pengetahuan		Kependudukan?
	W-A1-YH	Klo saya sendiri sih belum tau berapa dana yang dibutuhkan
	P	Jadi bu pas pembentukan RDK itu eh tidak ada dana seperti apa bu
	W-A1-YH	Iya pas pembentukan itu ya memang tidak ada karena pembentukan secara simbolis aja karena bersamaan dengan pembentukan kegiatan kampung KB waktu itu
	P	Lanjut bu, bagaimana alokasi dana yang diberikan dalam pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan?
	W-A1-YH	Belum tau yak arena belum pernah dana selama
	P	Terus ibu apakah ada kendala dalam anggaran yang dikeluarkan?
	W-A1-YH	Kendalanya sih ada tapi gak tau ya alasannya kendala itu apa gitu, belum tau kendalanya seperti apa sehingga dananya belum keluar
	P	Baik bu kita lanjut saya mau bertanya ke mengenai pengetahuan
	W-A1-YH	iya ibu
	P	Baik kita lanjut ke bagian soal pengetahuan, di RDK ini siapa aja yang bertanggung jawab ya bu?
	W-A1-YH	Yang bertanggung jawab dalam kegiatan RDK ini adalah ketua RDK, P2KB, dan kadernya
	P	Kadernya itu berapa orang sih bu?
	W-A1-YH	Kemarin sih ada 4 orang eh 2 lah kemarin kan semuanya ada 4 kemarin itu ketua sama kader
	P	Eh terus bu, apa tujuan dibentuknya RDK
	W-A1-YH	Sebagai pusat pengelola data kampung KB, supaya mengetahui permasalahan yang ada di kampung KB Long Melaham
	P	Berapa jumlah orang atau petugas penyuluh yang terkait dengan informasi tentang RDK ini bu?
	W-A1-YH	Ada 4 orang, 1 ketua RDK, 2 PKB, 3 kadernya 2 orang
	P	Jadi jumlahnya ada 4 orang ya bu
	W-A1-YH	Iya
	P	Terus bu di RDK ada kegiatan semacam apa saja ya bu?
	W-A1-YH	Untuk kegiatannya sih ada pendaatan keluarga, ada kependudukan terus eh mengolah data stunting terus data PUS, WUS, eh balita dan lansia gitu

P	Terus hasil laporan nanti dibawa kemana bu?
W-A1-YH	Itu langsung di bawa ke petinggi bu
P	Jenis pelayanan apa saja yang ada di Rumah Data Kependudukan ini?
YH	Klo di rumah data itu sih eh tidak ada pelayanan Cuma ada kegiatan semacam pengolahan data itu tadi yang sudah disebutkan
P	Berarti tidak ada pelayanan bu ya?
W-A1-YH	Ya tidak ada cuman kegiatan saja
P	Apakah sumber daya yang ditempatkan di Rumah Data sudah tercukup bui?
W-A1-YH	Menurut saya sih belum tercukupi ya karena tidak ada alokasi dana sampai sekarang dan saat ini
P	Bagaimana profesionalisme petugas atau penyuluh yang dilakukan di Rumah Data dalam memberikan pelayanan?
W-A1-YH	Ya kami sebagai kader atau petugas tetap professional tetap melakukan kegiatan terkait dengan laporan yang diperlukan di rumah data misalnya melakukan pengolahan data, terus kami berusaha menjalankan kegiatan terkait laporan yang diperlukan walaupun banyak kendala tetap berusaha mencari solusi agar kegiatan yang di rumah data berjalan dengan lancar
P	Bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh petugas atau penyuluh tentang informasi Rumah Data Kependudukan dalam pemberian informasi kepada masyarakat
W-A1-YH	Untuk pengetahuan sih kami cukup ya mengetahui seperti melakukan kegiatan laporan rutin tetap dijalankan walaupun kurang dukungan dari Pemerintah kampung , kami tetap menjalankan dengan sabar
P	Bagaimana kesiapan pengetahuan yang dimiliki oleh kader Posyandu dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat?
W-A1-YH	Kesiapan sih kami sudah siap dengan tugasnya kadernya dan saya sebagai penyuluh lapangan juga turun langsung melakukan pendataan gitu
P	Terus apa saja tupoksi ibu di RDK?
W-A1-YH	Tupoksi saya sebagai penyuluh lapangan sih sebagai pendamping aja apa butuhkan atau kurang paham saya bantu mereka

P	Ada kelengkapan fasilitas apa saja yang ada di RDK
W-A1-YH	Klo sementara ini kan belum ada fasilitas cuman waktu kami melakukan kegiatan itu kan kami pakai peralatannya sendiri ya untuk melakukan kegiatan jadi di RDK itu tidak ada
P	Apakah laporan kegiatan ini tepat waktu bu?
W-A1-YH	Ya klo dibilang tepat waktu tapi ya karena kadernya juga sibuk jadi agak lambat dalam melaporkan kegiatannya
P	Baik ibu sudah selesai wawancara kita, terimakasih banyak atas infonya
	Terima kasih, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai
W-A1-YH	Iya sama-sama bu, Mudahah cukup jelas apa yang saya sampaikan ini
P	Iya bu sudah sangat jelas, makasih.
P	Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali
W-A1-YH	Ya selamat pagi juga

MASTER

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGOLAHAN RUMAH DATA
KEPENDUDUKAN
DI KAMPUNG KB LONG MELAHAM TAHUN 2024

Informan : 2 (Informan Utama)
 Peneliti : Yurita
 Subjek : W-A3-LM (Ketua RDK Kampung KB Batew Teneveng Long Melaham)

Catatan Lapangan	Kode	Transkrip Wawancara
Anggaran Dana	P	Selamat pagi pak?
	W-A3-LM	Ya selamat pagi juga bu. Ada apa bu?
	P	Maaf mengganggu waktu bapak ini
	W-A3-LM	Iya, tidak apa. Jadi gimana ini bu?
	P	Jadi begini pak, perkenalkan nama saya Yurita, saya mahasiswa dari Widyagama. Saat ini saya mau mengadakan penelitian sebagai syarat Tugas Akhir dengan judul Analisis implementasi pengolahan Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham. Apakah bapak bersedia untuk saya wawancarai sebagai informan pendukung dalam penelitian saya ini?
	W-A3-LM	Ya, saya bersedia bu.
	P	Baik pak, silahkan perkenalkan biodata bapak?
	W-A3-LM	Nama saya Lambung, umur 52 tahun dan saya bekerja sebagai ketua RDK selama 2 tahun
	P	Baik terima kasih
	P	Baik disini saya mau bertanya terkait dana yang ada di Rumah Data, seperti apa dana yang ada di RDK ini pak?
	W-A3-LM	Terkait dana yang ada di Long Melaham ini selama kurang lebih 2 tahun saya menjabat sebagai ketua RDK belum ada dana riil yang kami terima. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang dana bu, terima kasih
	P	Itu dananya dirumah data ini untuk apa saja ya pak?
	W-A3-LM	Seperti yang saya katakan tadi bu karena belum pernah ada dana yang kami terima riil dan tunai maka untuk penggunaan dana saya tidak berani

	mengatakan untuk apa saja penggunaannya, namun sepengetahuan saya tidak ada dana yang diberikan dari Desa yang dikucurkan kepada rumah data ya tentunya dana-dana tersebut dipergunakan sebagai operasional saja misalnya mungkin bisa digunakan untuk transportasi anggota-anggota, teman-teman rumah data itu pada saat ada kegiatan itu persentase di Kabupaten atau di kampung sendiri ataupun kecamatan, atau di Dinas Kesehatan. Lalu bisa juga dana tersebut digunakan untuk membeli keperluan-keperluan atk, itu saja sih bu terkait dana tapi karena memang belum ada dana yang diserahkan secara langsung ke kami dan pengelolaannya juga belum kami lakukan, demikian bu terima kasih
P	Baik pak, terus pak untuk dana di rumah data itu bersumber dari mana pak ya dan terus siapa yang bertanggung jawab atas dana yang ada di rumah data ini?
W-A3-LM	Berkaitan dengan sumber dana untuk dana rumah data kependudukan itu bisa diambil dari dana desa dan yang bertanggung jawab atas dana tersebut ya kepala desa setempat yang nantinya dikucurkan kepada pengurus rumah data
P	Bagaimana pengetahuan bapak tentang Rumah Data Kependudukan ini pak?
W-A3-LM	Rumah data kependudukan ini dibentuk untuk pendataan penduduk supaya mengetahui keberadaan penduduk, kesehatan, masyarakat setempat, apakah masyarakat sehat sesuai dengan harapan dari Pemerintah apakah ada masyarakat yang kurang gizi, stunting, sudah cukup sejahtera atau tidak. Itu yang saya tau berkaitan dengan rumah data secara umum bu, terimakasih
P	Eh tujuan dibuatnya RDK ini pak?
W-A3-LM	Dilihat dan ditelusuri dengan baik fungsi rumah data kependudukan ini adalah sebagai pusat data dan informasi permasalahan kependudukan, kb dan pembangunan keluarga, sebagai pusat integrasi aktivitas kampung KB. Ketersediaan statistik handal yang disediakan
P	Baik pak bagaimana dukungan Pemerintah mengenai dana yang dianggarkan dalam pembentukan Rumah Data Kependudukan?
W-A3-LM	Menurut informasi yang pernah disampaikan oleh petinggi pemegang kampung Long Melaham

Pengetahuan		beliau sangat mendukung tentang RDK dan siap untuk membantu dengan dana yang sesuai namun pada kenyataannya belum ada gitu. Mudah-mudahan saja hal ini bisa diselesaikan oleh petinggi Long Melaham. Klo dukungan sangat mendukung petinggi
	P	Eh berapa dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembentukan Rumah Data Kependudukan?
	W-A3-LM	Klo estimasi saya sih 75 juta bu untuk pembentukan rumah data itu ya seperti atk, untuk operasional dan sebagainya itu dana awal. Estimasi saja sih belum bisa kita tentukan karena kita juga belum hitung secara riil apa yang diperlukan, begitu bu
	P	Bagaimana alokasi dana yang diberikan dan kendala dalam pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan?
	W-A3-LM	Menyangkut dana selama kurang lebih 2 tahun saya menjabat sebagai ketua RDK ini belum ada dikucurkan dana jadi kendalanya ya itu belum ada dikucurkan, mau ngomong kendalanya apa lagi bu saya gak tau lagi apa. Mungkin juga kita belum buat laporan yang fix ke pihak petinggikah atau gimana kah atau juga kami hanya sebagai petugas RDK hanya sebatas wacana sebatas bincang pertemuan
	P	Baik kita lanjut ya pak ke bagian pengetahuan, bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh petugas atau penyuluh tentang informasi Rumah Data Kependudukan dalam pemberian informasi kepada masyarakat
	W-A3-LM	Sejauh ini para narasumber yang datang menyuluh kepada masyarakat dari Dinas Kesehatan itu ya menurut saya sih sangat kompeten dalam penyampaian mereka terkait rumah data bu
	P	Jenis pelayanan apa saja yang ada di Rumah Data Kependudukan ini?
	W-A3-LM	Pengelolaan data secara khusus lalu pendataan tentang situasi dan kondisi kesehatan dikampung setempat khususnya menyangkut stunting, itu yang yang saya tau bu
	P	Apakah sumber daya yang ditempatkan di Rumah Data sudah tercukup pak?
	W-A3-LM	Sudah cukup kemaren bu, sesuai aja dengan

	arahan pihak provinsi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu
P	Terus pak kelengkapan fasilitas apa saja yang ada di RDK?
W-A3-LM	Hanya ada beberapa alat dapur sih bu, belum ada peralatan yang lengkap bu itu. Hanya ada papan, papan data pun belum ada, belum ada sih bu belum lengkap. Semoga saya nanti melengkapinya nanti. Saya akan berkoordinasi dengan petinggi bagaimana caranya lagi untuk melengkapi fasilitas di RDK itu nanti bu.
P	Klo tidak fasilitas data tersebut apakah bisa berjalan kah pak, pendataan di RDK ini pak?
W-A3-LM	Sejauh ini bu pendataan RDK ini berjalan dengan lancar bu karena ya terus terang aja fasilitas yang digunakan ya fasilitas pribadi seperti laptop, printer dan lain sebagainya. Ini yang pergi mendata ya pakai motor sendiri, BBM sendiri, ya semua kita lakukan dan teman-teman lakukan demi kampung bu. Mudah-mudahan saja nanti setelah ada koordinir bisa ada perubahan-perubahanlah. Lalu fasilitas seperti papan data itu sudah dipasang oleh teman-teman dari Dinkes kemarin membantu, itu ada disekretariat rumah data itu walaupun ia masih berupa kertas di papan itu namun sudah lumayan bisa kita ambil dokumentasi
P	Baik pak terimakasih, terus mohon maaf nih pak, kira-kira apa tupoksi bapak?
W-A3-LM	Bekerja sama dengan anggota lainnya untuk mendata data kependudukan di kampung dan mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi dimasyarakat khususnya dibidang kesehatan apakah ada gejala stunting, kurang gizi perlu adanya makanan tambahan dan memperhatikan situasi lingkungan kesehatan kebersihan lalu mendata bersama rekan-rekan rumah dataku sebagai laporan ke Dinas terkait untuk ditindak lanjuti klo ada hal-hal yang memungkinkan terjadinya masalah kesehatan di suatu kampung
P	Baik pak, untuk hasil laporan nanti dibawa kemana saja pak?
W-A3-LM	Ya hasilnya itu dibawa ke provinsi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat
P	Apakah pengumpulan laporan data di Rumah Data Kependudukan ini tepat waktu pak?

W-A3-LM	Selalu tepat waktu karena selalu bekerja sama dengan perangkat desa, RT, juga data-data yang kami cari juga mudah diperoleh
P	Hasil pengumpulan data apakah dapat dipercaya atau diandalkan?
W-A3-LM	Semua data yang kami peroleh itu dapat diandalkan dan dipercaya karena data-data itu berasal dari perangkat kampung/ desa sendiri dan bekerjasama dengan masyarakat setempat jadi tidak ada data-data yang direkayasa
P	Baik pak demikian wawancara ini, saya ucapkan terimakasih
W-A3-LM	Iya sama-sama bu
P	Terimakasih kembali pak sudah meluangkan waktunya
P	Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali
W-A3-LM	Ya selamat pagi juga

MASTER

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGOLAHAN RUMAH DATA
KEPENDUDUKAN
DI KAMPUNG KB LONG MELAHAM TAHUN 2024**

Informan : 3 (Informan Pendukung)
 Peneliti : Yurita
 Subjek : W-A3-NH (Kader RDK Kampung KB Batew Teneveng Long Melaham)

Catatan Lapangan	Kode	Transkrip Wawancara
Dana	P	Selamat siang bu?
	W-A3-NH	Ya selamat siang juga bu. Ada apa bu?
	P	Maaf mengganggu waktu bu ini
	NH	Ada yang bisa saya bantu bu?
	P	Jadi begini bu, perkenalkan nama saya Yurita, saya mahasiswa dari Widyagama. Saat ini saya mau mengadakan penelitian sebagai syarat Tugas Akhir dengan judul Analisis implementasi pengolahan Rumah Data Kependudukan di kampung KB Long Melaham. Apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai sebagai informan pendukung dalam penelitian saya ini?
	W-A3-NH	Ya, saya bersedia bu.
	P	Baik disini saya mau bertanya terkait dana yang ada di Rumah Data ya bu, maksudnya seperti apa bu dana yang ada di Rumah Data Kependudukan?
	W-A3-NH	Bersumber dari swadaya masyarakat, alokasi dana desa, APBD, APBM dan bantuan swasta atau perusahaan baik melalui bantuan langsung maupun CSR.
	P	Baik terus untuk dana di rumah data ini untuk apa saja ya bu?
	W-A3-NH	Untuk operasional rumah data, sejauh ini masih dari swadaya kader aja untuk keperluan ATK yang dibutuhkan saat ini. klo dana yang lainnya itu belum ada.
	P	Baik bu, terus penyaluran dana di rumah data kependudukan siapa bu yang bertanggung jawab?
	W-A3-NH	Yang bertanggung jawab itu petinggi langsung bu,
	P	Bagaimana dukungan Pemerintah mengenai dana yang dianggarkan dalam pembentukan Rumah Data

Pengetahuan		Kependudukan?
	W-A3-NH	Pemerintah itu sebenarnya sudah sangat mendukung cuman tidak ada tindak lanjut dalam mengeluarkan dana untuk kebutuhan rumah data dan belum ada sama sekali sampai saat ini
	P	Jadi bu pada pembentukan RDK ini memang tidak ada dana atau seperti apa itu bu
	W-A3-NH	Pas pembentukan tadi secara simbolis aja karena bersamaan dengan pembentukan kampung KB
	P	Jadi tidak ada dana yang dikeluarkan buy a?
	W-A3-NH	Tidak ada
	P	Eh berapa dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembentukan Rumah Data Kependudukan?
	W-A3-NH	Belum tau karena belum pernah ada
	P	Sama sekali belum ada dana begitu bu ya
	W-A3-NH	Iya belum
	P	Bagaimana alokasi dana yang diberikan dalam pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan?
	W-A3-NH	Klo saya sendiri belum tau berapa dana yang dibutuhkan
	P	Apakah ada kendala dalam anggaran yang dikeluarkan?
	W-A3-NH	Belum tau kendala karena memang belum ada penganggaraan sampai sekarang
	P	Sudah pernah mengajukan anggaran rumah data kependudukan inikah ibu?
	W-A3-NH	Tidak pernah
	P	Baik bu kita lanjut ke bagian pengetahuan
	W-A3-NH	Silahkan ibu
	P	Baik kita lanjut ke bagian soal pengetahuan, apa yang ibu ketahui tentang Rumah Data Kependudukan ini?
	W-A3-NH	Jadi RDK ini adalah pusat data atau kependudukan/ tempat pengolahan dan pemanfaatan data yang bersumber langsung dari oleh dan untuk masyarakat kampung KB ini sendiri.
	P	Eh terus bu, apa tujuan dibentuknya RDK
	W-A3-NH	Sebagai pusat pengelola data kampung KB, supaya mengetahui permasalahan yang ada di kampung KB Long Melaham
	P	Berapa jumlah orang atau petugas penyuluh yang

	terkait dengan informasi tentang RDK ini bu?
W-A3-NH	Ada 4 orang, 1 ketua RDK, 2 PKB, 3 kadernya 2 orang
P	Jadi jumlahnya ada 4 orang ya bu
W-A3-NH	Iya
P	Terus bu bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh petugas atau penyuluh tentang informasi Rumah Data Kependudukan dalam pemberian informasi kepada masyarakat?
W-A3-NH	Kader posyandu belum memahami tujuan dibentuknya rumah data
P	Jenis pelayanan apa saja yang ada di Rumah Data Kependudukan ini?
W-A3-NH	Di rumah data ini tidak ada pelayanan hanya kegiatan semacam pengumpulan data dan pengolahan serta penyajian data saja
P	Apakah sumber daya yang ditempatkan di Rumah Data sudah tercukupi?
W-A3-NH	Belum tercukupi dan masih sangat kurang,
P	Bagaimana profesionalisme petugas atau penyuluh yang dilakukan di Rumah Data dalam memberikan pelayanan?
W-A3-NH	Sudah professional petugas atau penyuluh tetap melakukan kegiatan terkait rumah data misalnya melakukan pengolahan data, menjalankan kegiatan terkait laporan yang diperlukan di rumah data walaupun banyak kendala tetap berusaha mencari solusi agar berjalan dengan lancar
P	Bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh petugas atau penyuluh tentang informasi Rumah Data Kependudukan dalam pemberian informasi kepada masyarakat
W-A3-NH	Cukup mengetahui seperti laporan rutin tetap dijalankan walaupun kurang dukungan dari Pemerintah kampung
P	Di RDK ini kegiatan semacam apa ya bu
W-A3-NH	Semacam kegiatan pendataan data keluarga, data kependudukan, stunting, PUS, WUS, bayi balita dan lansia
P	Terus hasil laporan nanti dibawa kemana bu?
W-A3-NH	Kepetinggi, ke Dinkes, P2KB cc ke pengendalian kependudukan untuk laporan SIGA (Sistim Informasi Keluarga)
P	Terus apa saja tupoksi ibu di RDK?

W-A3-NH	Tupoksi saya sebagai kadernya yang mendata langsung ke masyarakat jadi saya mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data
P	Ada kelengkapan fasilitas apa saja yang ada di RDK
W-A3-NH	Tidak ada fasilitas apa pun di RDK ini, masih kosong melompong, he,,,he..
	Baik ibu sudah selesai wawancara kita, terimakasih banyak atas infonya
W-A3-NH	Iya sama-sama bu, Mudahah cukup jelas apa yang saya sampaikan ini
P	Iya bu sudah sangat jelas, makasih.

Lampiran 3:



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

KANTOR PETINGGI KAMPUNG LONG MELAHAM
KECAMATAN LONG BAGUN

RUMAH DATA KEPENDUDUKAN

Alamat : Kawasan Perkantoran Desa Long Melaham
Telp : Petinggi (0822 1140 2309) Sekretaris (08534961 2277) ✉ 75767

REKOMENDASI PENERIMAAN PENELITIAN

NOMOR : 001- 01/RDK/LM-LB/VI/2024

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lambung, S.Pd
NIP : 19731118 202312 1 002
Pangkat/Golongan : IX
Jabatan : Ketua Rumah Data Kependudukan
Instansi : Rumah Data Kependudukan Kampung Long Melaham

Memberi Rekomendasi Kepada:

Nama : Yurita
NPM : 19.1320.1124
Pekerjaan : Mahasiswa
Universitas : Widya Gama Mahakam (FKM-UWGM) Samarinda
Fakultas : Kesehatan Masyarakat
Peminatan : Administrasi Kebijakan Kesehatan

Dengan ini kami menerima yang bersangkutan diatas untuk melaksanakan kegiatan Penelitian di Rumah Data Kependudukan Kampung KB Long Melaham mulai dari tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Long Melaham, 20 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Rumah Data Kependudukan


Lambung, S.Pd
NIP. 19731118 202312 1 002

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Dengan Ketua Rumah Data Pak Lambung



Wawancara dengan PLKB ibu Yohana Hengin



Wawancara dengan Kader Rumah Data ibu Natalia Dahai



Lampiran 4 Dokumentasi Bersama anggota Rumah Data Kampung KB Long Melaham



Penimbangan Bayi di Posyandu



Pemberian Vitamin A



Pemberian makanan tambahan



Mengukur Tinggi Badan Anak



Lampiran 4 Dokumentasi Bersama kader posyandu

